

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Jawa Barat. Dengan luas daerah 4.146 km², Kabupaten Sukabumi menjadi Kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Sukabumi terdiri dari 47 Kecamatan, 5 Kelurahan, dan 381 Desa. Pesisir pantai Sukabumi merupakan salah satu bagian rangkaian pesisir selatan pulau Jawa yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, yang terbentang dari Provinsi Banten di bagian barat hingga Provinsi Jawa Timur di bagian timur. Pesisir ini terbentang sepanjang 1.604 kilometer, dari total 108.000 kilometer garis pantai yang dimiliki Indonesia. Laut di bagian selatan pulau Jawa memiliki karakteristik dengan topografi dasar laut yang curam dengan gelombang yang besar (Mahatmawati, et al, 2009). Sukabumi sendiri memiliki garis pantai sepanjang ± 117 KM, dimana kecamatan yang berbatasan dengan laut yaitu kecamatan Cisolok, Cikakak, Palabuhan Ratu, Simpenan, Ciemas, Ciracap, Surade, Cibitung dan Tegalbuleud.

Setyawan dan Pamungkas (2017) mengungkapkan bahwa keadaan geografis sangat menentukan karakteristik oseanografi suatu perairan. Bila dilihat dari posisi Pantai Selatan Jawa, kontur yang dimiliki berbentuk lurus karena perairan ini terletak di kawasan pertemuan lempeng benua dan lempeng samudera, yang efeknya selain kemungkinan bencana yang lebih besar seperti *Tsunami*, ombak yang ditimbulkan juga cenderung lebih besar. Karakteristik pasang surut di Pantai Selatan Jawa juga bertipe *mixed tide prevailing semidiurnal*, yaitu terjadinya dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi gelombang dan periode yang berbeda.

Gelombang Pantai Selatan Jawa yang besar disebabkan juga oleh kecepatan angin, durasi angin, dan area pembangkit ombak. Bila dibandingkan dengan Pantai Utara Jawa yang berbatasan dengan Kalimantan, area pembangkit ombaknya cenderung terbatas sehingga

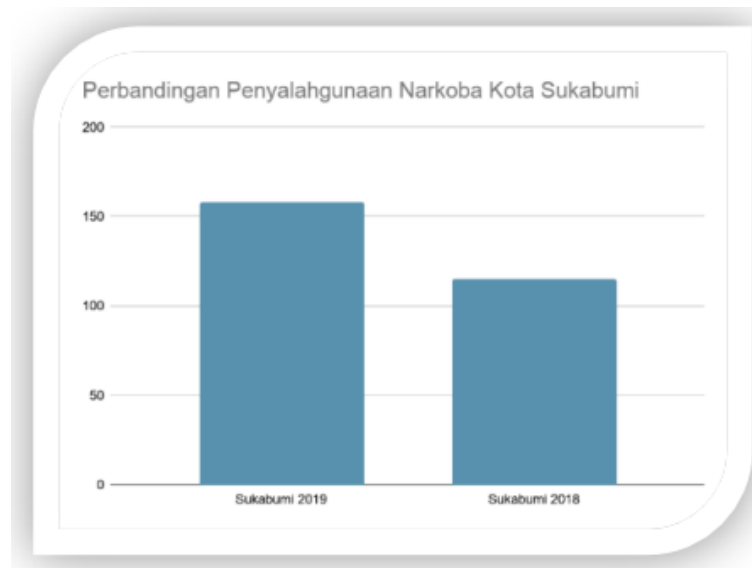
menghasilkan ombak yang kecil. Sebaliknya, perairan di Selatan Jawa memiliki area pembangkit ombak yang mencapai ribuan kilometer yang terbentang seluas Samudera Hindia, sehingga besar energi gelombang yang dihasilkan jauh lebih besar (Oceanpulse, n.d.).

Selain ombak, faktor yang membedakan Perairan Selatan Jawa dengan perairan lain di Indonesia adalah kontur dasar laut yang curam dan tidak seragam yang seringkali menyebabkan *Rip Current* atau arus dari pantai menuju laut akibat perbedaan kedalaman. *Rip Current* dengan ciri aliran laut yang tenang namun kecepatannya sangat besar inilah yang membuat perairan selatan Jawa menjadi jauh lebih rawan kecelakaan daripada perairan lain, baik bagi nelayan maupun petugas berwenang yang berpatroli serta pelaut dengan kepentingan lain.

Dengan kondisinya tersebut, garis pantai di Kabupaten Sukabumi menjadi tempat yang dapat digunakan untuk jalur penyelundupan narkoba oleh sindikat pengedar narkoba. Namun dalam prakteknya, hambatan-hambatan alam juga membatasi tugas dari instansi terkait dalam upaya penanggulangan penyelundupan tersebut. Oleh karenanya perlu upaya tertentu dari pihak-pihak berwenang yang dapat memaksimalkan upaya penanggulangan penyelundupan narkoba tersebut.

4.1.1. Peredaran, Penyelundupan, dan Penanggulangan Narkoba

Perkembangan peredaran gelap narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hasil kajian BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia mencatat jumlah pengguna narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat. Merujuk pada data yang dikeluarkan BNN pada tahun 2021, jumlah pengguna narkoba tercatat mengalami kenaikan, khususnya di daerah perkotaan. Mintawati & Budiman (2021) menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di Sukabumi sendiri mengalami peningkatan, hal ini ditunjukkan oleh gambar 4.1.



Gambar 4.1 Perbandingan penyalahgunaan Narkoba di Kota Sukabumi

Sumber: Mintawati & Budiman (2021)

Sedangkan menurut BNN (2021), dalam kurun waktu 2019 hingga 2021, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,80% menjadi 1,95% di tahun 2021.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Cibadak Sukabumi memvonis mati 9 warga negara Indonesia dan 4 orang asing karena kasus narkoba. Keputusan ini diambil terkait penyelundupan sabu ke Indonesia melalui Pelabuhan Ratu menggunakan kapal penangkap ikan. Barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 402 kg yang ditemukan di kawasan elit di Kecamatan Sukaraja, Sukabumi. Putusan vonis mati 13 orang dalam satu hari di Pengadilan Negeri Cibadak memecahkan rekor. Humas Pengadilan Negeri Cibadak Muhammad Zulqarnain menyatakan, 4 dari 13 terdakwa yang divonis mati adalah WNA dan 9 WNI. Zulqarnain juga mengumumkan bahwa 4 orang asing yang dijatuhi hukuman mati adalah Husen dan Samiullah, yang merupakan perantara dalam jual beli narkoba. Sedangkan Mahmoud dan Atefeh mengambil peran pencucian uang. 9 WNI yang divonis hukuman mati bertugas sebagai koordinator dan kurir. Sembilan terdakwa melanggar pasal 114 ayat 2 UU Narkotika. Jadi, menurut putusan hakim, 9 terdakwa yang berkewarganegaraan Indonesia itu lebih banyak berperan sebagai kurir. Tapi kemudian ada juga koordinator kecil dalam

pelaksanaan pembelian sabu-sabu tersebut, kemudian dibawa ke daratan. Kasus ini merupakan lanjutan dari kasus sebelumnya di Kabupaten Banten.

Maraknya tindak pidana narkoba seringkali didorong oleh dua hal, yang pertama yaitu keuntungan besar yang dijanjikan bagi produsen dan pengedar (A.Kadarmanta, 2010). Keadaan ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang semakin sulit untuk memperoleh pendapatan dan memenuhi kebutuhan dasar, sehingga sebagai pengedar narkoba mereka memilih jalan pintas untuk melakukan kejahatan, yang notabene menjanjikan upah atau penghasilan yang besar dalam waktu singkat. Kedua, menjanjikan rasa nyaman dan memberikan ketenangan dan ketentraman bagi pengguna narkoba. Hal ini memang disebabkan karena kurangnya pengetahuan pengguna tentang efek dari pengguna narkoba secara terus menerus dan dalam jangka waktu yang lama.

Mintawati dan Budiman (2021) menyatakan bahwa pencegahan peredaran narkoba dapat dilakukan melalui berbagai strategi dan taktik pemerintah, yang kemudian dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh pejabat lembaga yang terlibat dalam layanan sosial pencegahan narkoba. Di sisi lain, strategi untuk mengurangi permintaan narkoba meliputi pencegahan penggunaan narkoba dan peredaran narkoba, termasuk pencegahan primer atau dini bagi individu, keluarga atau masyarakat yang tidak terpengaruh oleh penggunaan narkoba. Oleh karena itu, individu, kelompok dan keluarga harus pantang menyerah memerangi narkoba. Pencegahan sekunder atau pencegahan kerentanan untuk kelompok atau komunitas yang rawan narkoba. Level 3 atau pencegahan kekambuhan bagi pengguna/pecandu narkoba yang telah menyelesaikan pengobatan dengan rencana rehabilitasi untuk mencegah kekambuhan. Peredaran obat-obatan terlarang dan prekursor obat untuk tujuan medis, ilmiah atau industri berada di bawah kendali pemerintah. Pengendalian prosedur hukum ini mencakup pengendalian atas pemrosesan, produksi, impor, ekspor, pengangkutan, penyimpanan, distribusi dan pengiriman oleh otoritas yang berwenang (termasuk Departemen Pengawasan Peredaran Narkoba). Pengendalian peredaran narkoba meliputi pencegahan melalui darat, udara dan laut.

4.1.2. Profil BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi

a. Profil BNNK Sukabumi

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sukabumi (BNNK Sukabumi) merupakan kepanjangan tangan dari Badan Narkotika Nasional Pusat, dimana cakupan tugas dari BNNK Sukabumi meliputi Kabupaten Sukabumi dan Kota Sukabumi. BNNK diperlukan di setiap daerah di seluruh Indonesia untuk mengatasi Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). BNNK Sukabumi merupakan salah satu instansi penegak hukum, dimana BNNK Sukabumi memiliki hak dan wewenang dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan hingga penangkapan tersangka pengedar narkoba. Saat ini BNNK Sukabumi dikepalai oleh Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. yang membawahi 3 divisi, yaitu Divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2N), Divisi Rehabilitasi, dan Divisi Pemberantasan.

BNNK Sukabumi memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas BNNK Sukabumi

- a) Melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- b) Melaksanakan hubungan kerjasama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- c) Melakukan penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan BNN Kabupaten Sukabumi;
- d) Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- e) Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi; dan

- f) Melakukan penyiapan pelaksanaan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi.

2. Fungsi BNNK Sukabumi

- a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- c) Pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi;
- e) Pelayanan administrasi BNN Kabupaten Sukabumi; dan
- f) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNN Kabupaten Sukabumi.

Dalam menjalankan tugasnya, BNNK Sukabumi memiliki 3 divisi, yaitu divisi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2N), divisi Rehabilitasi, dan Divisi Pemberantasan. Sebagai sebuah instansi, BNNK Sukabumi juga memiliki divisi tambahan yaitu Divisi Umum sebagai *support system* dalam hal kepegawaian, administrasi, dan lain-lain.

b. Profil Polairud Polres Sukabumi

Polairud Polres Sukabumi merupakan salah satu instansi penegak hukum yang cakupan tugasnya berada di sepanjang pesisir pantai Kabupaten Sukabumi, bekerja sama dengan beberapa instansi terkait dalam rincian tugasnya masing-masing, sebagai contoh bekerja sama dengan Basarnas dalam upaya penyelamatan kecelakaan di laut, dengan TNI AL dan Dinas perhubungan dalam rangka patroli gabungan, dengan BNN dalam upaya penindakan penyelundupan narkoba melalui jalur laut,

dan lain-lain. Saat ini Polairud Polres Sukabumi dipimpin oleh Kasat AKP Tri Andri Affandi.

Tugas Polairud Polres Sukabumi antara lain menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara yang mencakup penegakan hukum, patroli, fasilitas kendaraan, dan perbaikan kapal. Adapun fungsi Polairud Polres Sukabumi antara lain:

1. Penyusunan rencana kerja dan anggaran, administrasi, manajemen personal dan pengembangan logistik, manajemen di bidang administrasi, dan manajemen keuangan.
2. Pelaksanaan manajemen operasional, pelatihan, pendataan dan pengolahan penyajian informasi, dokumentasi kegiatan Ditpolairud dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, dan penanganan terhadap tahanan dan barang bukti.
4. Pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan dan penyelamatan di laut dan perairan, pembinaan masyarakat perairan, dan potensi masyarakat
5. Penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polres serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Fasilitas serta Sarana Kapal di lingkungan Polres.
6. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

c. Profil POS AL Sukabumi

POS Angkatan Laut (POS AL) Sukabumi terletak di Palabuhan Ratu, Sukabumi. Saat ini POS AL memiliki lingkup 2 kabupaten, yaitu kabupaten Sukabumi dan Cianjur. Di pesisir selatan Jawa Barat sendiri terdapat 3 POS AL, yaitu POS AL Sukabumi, POS AL Cikelet Garut, dan POS AL Pangandaran. POS AL Sukabumi bertugas dibawah komando LANAL Bandung. Saat ini POS AL Sukabumi dipimpin oleh Kapten (mar) Sri Agus Subagyo.

Tugas-tugas POS AL antara lain:

1. Pengamatan
POS AL melaksanakan pengawasan terhadap laut tertentu atas kejadian dan kegiatan di wilayah perairan
2. Puldata Intelmar
Dalam rangka pengumpulan data intelejen maritim
3. Laporan dini
Agar setiap kejadian/kegiatan yang bisa menimbulkan kerawanan di wilayahnya, dapat diketahui/dilaporkan secara dini

Sementara fungsi POS AL antara lain:

1. Fungsi Asal
 - a) Pendeteksian Dini
 - b) Puldata Intelejen Maritim
2. Fungsi Tambahan
 - a) Mendukung operasi keamanan laut
 - b) Bantuan pengamanan daerah
 - c) Pembinaan masyarakat maritim dan potensi maritim terbatas
 - d) Bantuan SAR terbatas di laut

4.1.2. *Interagency Coordination* antar Instansi di Kabupaten Sukabumi

Dalam menjalankan tugasnya, setiap instansi memiliki rincian tugas yang sulit bila dilakukan sendiri. Sebagai contoh, BNNK Sukabumi menjalin kerjasama dengan pihak Polres, TNI AL, Pemerintah Daerah, pihak swasta dan masyarakat dalam upaya memerangi kejahatan narkoba di Kabupaten Sukabumi.

Secara garis besar, menurut kepala BNNK Sukabumi, koordinasi antar instansi di Sukabumi telah terjalin dengan baik. Koordinasi antara BNNK Sukabumi dan instansi-instansi terkait telah banyak membantu BNNK Sukabumi dalam menjalankan tugas dalam pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba. Dari pernyataan ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa *interagency coordination* antara instansi instansi di Kabupaten Sukabumi telah berjalan dengan baik.

Hal ini dipicu oleh kebijakan *Whole of Government* (WOG), dimana menurut Ramadhan (2019), WOG adalah pendekatan tata kelola yang mengoptimalkan upaya kolaboratif dalam lingkup koordinasi semua sektor untuk mencapai tujuan pembangunan bersama dan tata kelola terpadu dalam memecahkan masalah yang muncul. Konsep ini pada hakekatnya merupakan solusi dari permasalahan yang ada dalam pemerintahan seperti komunikasi dan koordinasi antar instansi.

Oleh karenanya, setiap permasalahan yang identik dengan suatu lembaga tertentu, misalnya permasalahan narkoba identik dengan tugas BNN, permasalahan kecelakaan identik dengan Basarnas, menjadi tugas bersama. Pembatas kewenangan dan ego sektoral dalam penanganan suatu masalah dapat dihilangkan dan menjadi tanggungjawab seluruh instansi terkait dan seluruh elemen masyarakat yang terlibat didalamnya.

Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah menyelenggarakan WOG dengan cukup baik dalam menangani masalah-masalah di ruang lingkup pemerintahannya. Hal ini dibuktikan dengan koordinasi antarlembaganya yang telah terjalin dengan baik.

4.2. Hasil Pengumpulan Data

Hasil pengumpulan data dalam penelitian ini diuraikan secara deskriptif terkait data yang telah peneliti peroleh baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Data yang telah diperoleh dideskripsikan sesuai pertanyaan penelitian dan ditampilkan dalam bentuk uraian kalimat peneliti (kutipan tidak langsung), kutipan langsung wawancara maupun grafik, tabel, gambar atau bentuk lainnya tergantung dengan jenis data/informasi yang berhasil dikumpulkan dari lapangan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Penelitian terkait potensi ancaman, pola kejahatan dan upaya penanggulangan kejahatan penyelundupan narkoba serta *interagency coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL dilakukan dengan mewawancarai sejumlah informan terkait yaitu Kepala

BNNK Sukabumi, Kasat dan anggota Polairud Polres Sukabumi, serta Wakil Komandan dan anggota POS AL Sukabumi. Hasil wawancara diuraikan sebagai berikut.

4.2.1. Potensi Ancaman dan Pola Kejahatan Narkoba di Pesisir Kabupaten Sukabumi serta Upaya Penanggulangannya

Mengenai kejahatan penyelundupan narkoba di Kabupaten sukabumi, Peneliti mewawancarai beberapa instansi terkait, diantaranya BNNK Sukabumi. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala BNNK Sukabumi yaitu Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. Menurutnya, jalur penyelundupan di pesisir Kabupaten Sukabumi tidak sepenuhnya disebut jalur baru, karena kondisi alam dan edukasi yang kurang, tidak menutup kemungkinan sebelumnya pun banyak penyeludup memasukkan narkoba melalui pesisir Kabupaten Sukabumi, seperti yang dijelaskan oleh beliau sebagai berikut:

“Bila ditanya jalur baru, sebenarnya bukan jalur baru juga, sudah lama banyak penyeludup lewat pesisir sukabumi. Masalahnya mereka menggunakan jalur-jalur tikus, apalagi jarak pesisir sukabumi dengan pulau terdekat dari negara Australia, yaitu pulau Christmas itu hanya 4 jam. Ini yang menjadi tantangan bagi kami. Apalagi bila melibatkan nelayan yang edukasinya kurang, dihadapkan dengan upah yang menggiurkan tentu mereka mau, atau misalnya kapal mereka disewa dengan bayaran yang besar, mereka tentu mau daripada melaut mencari ikan yang belum tentu hasilnya. Mereka tentu senang dengan hal itu. Nelayan-nelayan tersebut biasanya ketika kapal mereka digunakan untuk peredaran narkoba, mereka tidak tahu. Ada juga yang tahu namun mereka memilih diam karena imbalannya setara atau bahkan lebih besar dari pendapatan mereka melaut.”
(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)

Hal ini diperkuat oleh pernyataan Serma (Kom) Wahyudin, Wakil Komandan POS AL Kab. Sukabumi, seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Sebenarnya sebelum tahun 2020 dimana dikatakan jalur baru itu juga sudah banyak kasus yang terjadi, disini daerah rawan sebenarnya, kita tidak mendapat banyak informasi kalau masih di laut, karena kebanyakan narkoba itu setelah diseludupkan, ketauannya itu setelah di darat, dilakukan pengejaran di darat. Asumsinya, kalau di daratnya itu sudah ada, maka di lautpun ada karena mereka menyeludupkannya lewat laut. Karena mereka menyeludupkannya itu tidak diketahui, lewat jalur-jalur terpencil itu. Pihak-pihak yang berwajib termasuk POSAL, Polairud, dan lain-lain juga sebenarnya lalai, ketika di laut tidak dapat menindak karena minim informasi, tapi pas sudah tertangkap di darat baru kami tau jalur-jalur yang digunakan. Walaupun tidak selalu dari pantai sebenarnya, ada juga pasti yang dari darat.

Sebagai contoh, dari Palabuhan Ratu sampai banten itu kosong, tidak ada pengamanan. Kalau ada yang menyeludupkan di daerah itu tidak akan ada yang tau tentunya. Sebenarnya mudah saja untuk menyeludupkan lewat laut itu. Mereka juga tidak bisa mengawasi langsung kalau tidak ada informasi dari masyarakat, makanya kita sama-sama bimbang masyarakatnya ini. Ya mungkin kalau kepolisian menyebutkan itu jalur baru, mungkin mereka punya pertimbangan dan parameter sendiri ya. Cuma setau saya, sudah sering penyeludup masuk lewat jalur tersebut. Beberapa waktu lalu, sebelum ada pernyataan jalur baru tersebut pun kami pernah melakukan pengejaran dan penangkapan bersama-sama. Masalahnya mungkin karena kondisi alam yang begitu, mungkin kita sama-sama tahu bahwa laut selatan itu ombaknya tinggi-tinggi, jadi kurang

pengawasan disana. Apalagi penyeludup-penyeludup tersebut menggunakan jalur yang tidak biasa dikunjungi orang, bahkan mereka tidak butuh dermaga untuk bersandar, biasanya perahu mereka dinaikkan saja ke pantai, di tempat-tempat terpencil. Bila seperti itu kan sulit untuk memantau” (**Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022**)

Wawancara berikutnya peneliti lakukan kepada informan dari Polairud Polres Sukabumi, yaitu Kasat Polairud AKP Tri Andri Affandi. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama, menurutnya sebenarnya tidak hanya di Sukabumi, namun di seluruh daerah pun para penyeludup mencari tempat yang pengamanannya longgar, seperti di sampaikan oleh beliau sebagai berikut:

“Narkoba itu ya, penyeludupannya mereka mencari tempat-tempat yang longgar pengamanannya, apalagi sukabumi ini punya garis pantai yang sangat luas ya, banyak sekali *spot-spot* yang bisa dijadikan tempat berlabuh, seperti pelabuhan-pelabuhan kecil yang biasa digunakan nelayan-nelayan kecil, itu mereka masuk lewat sana. Sedangkan kita melakukan patroli itu tidak setiap hari, itupun tidak bisa menangani keseluruhan garis pantai, karena kapal kita hanya 7. Apalagi patroli bersama itu juga tidak setiap waktu, insidental saja.” (**Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022**)

Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Bripka Rustian, anggota di Polairud Polres Sukabumi yang menyatakan bahwa patroli yang dilakukan tidak akan bisa mencakup seluruh garis pantai Sukabumi yang sangat panjang, seperti yang disampaikan berikut ini:

“kalau mau dimaksimalkan pun sebenarnya akan sulit, karena luas atau panjang garis pantai ini panjang sekali, ratusan kilometer. Kalau memang mengandalkan patroli saja untuk mencegah narkoba masuk, kita harus punya kapal

yang sangat banyak. Kita berandai-andai saja, misalnya kita pasang kapal patroli di setiap 1 kilometer di laut, dan berjaga selama 24 jam, itu pasti tidak akan ada, atau kecil kemungkinan masuk lewat pesisir Sukabumi. Masalahnya untuk sampai kesitu kita pasti akan kesusahan, dari mulai *resource* yang kurang, kapal cuma ada 7, anggota sedikit, waktu kita juga kan tidak bisa 24 jam ada di laut, sulit sekali itu. Apalagi anggarannya pun pasti akan sangat besar kalau skenarionya seperti itu. Makanya itu kita harus punya strategi lain kalau memang ingin mencegah. Kita ada potensi masyarakat, kita ada nelayan, ada juga instansi-instansi lain yang bisa kita ajak gabung” (**wawancara Briпка Rustian, 27 Januari 2022**)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kelengkapan dalam menunjang kinerja BNNK Sukabumi, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Menurut Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si., secara kuantitas SDM dan sarana itu kurang memadai, namun secara kualitas terus dimaksimalkan dan diupayakan agar perang melawan narkoba tetap berjalan sesuai yang diharapkan. Selain itu, pembentukan kerjasama juga dibangun dengan beberapa instansi untuk melengkapi kebutuhan sumber daya dalam upaya memerangi kejahatan narkoba tersebut. Berikut yang diungkapkan oleh beliau:

“Untuk SDM, BNNK sukabumi masih kurang karena hanya ada 29 orang anggota yang terdiri dari PNS BNN, PNS Pemda, Polri, dan dibantu para TKK atau tenaga kerja kontrak. Namun kami bekerja tidak hanya mengandalkan pegawai BNNK, kami mengajak seluruh *stakeholder* baik pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta untuk bersama-sama memerangi narkoba. Namun saya menekankan ke seluruh anggota, meskipun jumlah kita kurang, namun kita menekankan dari sisi kualitas dan kesolidan antar anggota. Meskipun kami meminta tambahan anggota ke pusat, namun keadaan di pusat pun masih

kekurangan anggota. Dalam 1 tahun kami hanya mendapatkan 1 anggota tambahan dari CPNS, sementara untuk mempekerjakan tenaga TKK, ada aturan 30% dari jumlah PNS. Maka semakin sedikit jumlah PNSnya, maka sedikit pula kami bisa mempekerjakan TKK. Maka dari itu, dari jumlah kami yang sedikit kami tetap harus bekerja semaksimal mungkin.” **(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)**

Sedangkan Polairud memberikan respon yang hampir sama, yaitu kurangnya personil dan sarana yang dimiliki. Meskipun begitu, Kasat Polairud AKP Tri Andri Affandi menyatakan bahwa dengan sarana yang terbatas, tugas pokok dari Polairud sudah berjalan dengan baik, sebagaimana yang diutarakan oleh beliau:

“Jumlah personil yang kita miliki memang terbatas, personil kita ada 16 orang, itu pun dibagi tempat tugasnya, sebagian di kantor pusat di Palabuhan Ratu, sebagian kita tempatkan di pos jaga di Ujung Genteng, yang jaraknya sekitar 80 km dari sini. Mengenai sarana pendukung, kita punya 7 kapal dan ada juga beberapa perahu karet untuk keperluan patroli. Namun demikian, kita harus memaksimalkan yang ada ya, karena tugas kita itu mengayomi, membuat aman di sekitar pesisir ini, jangan sampai ada Polairud tapi keadaan laut dan pantai tidak aman, termasuk dari penyelundupan narkoba. Semua yang kita punya kita maksimalkan untuk melaksanakan tugas pokok dari Polairud ini” **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Sedangkan informan dari POS AL menyatakan bahwa pihaknya berusaha untuk menjalankan tugas dengan baik meskipun dengan sarana dan prasarana serta SDM yang terbatas, seperti pernyataan beliau berikut ini:

“Kita punya satu speedboat patroli, dengan dua mesin 85pk, ada perahu karet, dan gedung-gedung ini yang kita punya

ini. Selain pos ini, ada Posmat di Ujung genteng dan di cianjur itu. Walaupun itu belum resmi, kita bangun dari swadaya pengusaha, hanya pos kecil saja. Fasilitas-fasilitas tersebut, dengan kondisi alam seperti ini, speedboatnya butuh tambahan sesuai dengan kondisi alam, dan kebutuhan emergency nya, seperti Sea Raider. Namun kita sekarang hanya bisa menggunakan yang ada. Untuk kebutuhan personil, berapa saja jumlahnya kita terima dan kita jalankan.

Kita memang butuh banyak personil, karena wilayah yang kami cover ada 2 kabupaten, Personilnya ada sekarang 13 orang mengcover sukabumi dan cianjur. Walaupun personil segitu, walaupun sedikit kita cukup-cukupkan, dan potensial, namun walaupun personil sedikit, kita juga kan ada yang namanya MUSPIDA, kita sinergi dengan muspida. Kita POSAL itu setingkat dengan kodim, polres, jadi masuknya Muspida. Jadi selama ini dengan personil segini, berjalan. Sedikit, tapi lumayan berhasil, tidak ada masalah selama ini”
(Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022)

Lebih lanjut Wakil Kepala POS AL menyatakan bahwa kinerja aparat penegak hukum di pesisir Kabupaten Sukabumi ini sudah mumpuni dengan segala keterbatasan SDM dan sarananya, seperti yang dinyatakan oleh beliau:

“Untuk penyelundupan narkoba itu peluangnya banyak, karena beberapa tahun kebelakang juga sudah banyak terjadi, di Ujung Genteng ada, di Palabuhan Ratu juga ada, bahkan yang di Ujung Genteng itu sampai ratusan kilo barang buktinya, yang tersangkanya orang Iran itu dulu, itu memang menurut informasinya sudah di intai sejak lama. Jadi kabarnya mereka itu memang diarahkan kesana, yang menyelidikinya sudah membuat skenario sedemikian rupa

untuk menangkap mereka, ada yang mengintai dari pusat, sudah diikuti dari sananya, hingga tertangkapnya di Ujung Genteng begitu. jadi memang kinerja para aparat ini sudah sangat bagus dalam menindak begitu.” (**Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022**)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai jumlah kasus yang telah dilakukan penindakan oleh BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi. Menurut Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si, sebenarnya banyak kasus yang harus ditangani oleh BNNK Sukabumi, namun terkendala anggaran, seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“Untuk jumlah kasus, lumayan banyak. Namun segala bentuk penindakan yang dilakukan BNNK berkaitan dengan anggaran. Pada tahun 2021 kami menargetkan penanganan 10 kasus, namun kemudian kami mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi sehingga kami mampu menangani hingga 15 kasus. Hal ini berhubungan dengan tugas Tim Assesmen Terpadu, yaitu dimana ketika seorang diduga terlibat kejahatan narkoba, ia dinilai sebagai pecandu atau pengedar, tugas ini dilakukan bersama-sama dilakukan dengan tim dari polres, kejaksaan, pengadilan, dan kesehatan. Untuk menyelidikannya, kami melakukan sebanyak 5 kasus, dan penyidikannya hanya dilakukan 1 kasus, dan yang di awal tahun 2022 dilakukan penyidikan 2 kasus ini merupakan kelanjutan dari kasus di akhir 2021. Di tahun 2021, akhir desember, sudah diintai selama 3 minggu dari Palabuhan Ratu, dan tertangkap di Cibadak sebanyak 25 gram sabu-sabu. Pengedar ini melakukan pekerjaannya seminggu 2 kali, sehingga total seminggu adalah 50 gram. Nominal dalam 1 kali transaksi sebanyak 47 juta rupiah. Dan tersangka ini sudah melakukan pekerjaannya selama 6 bulan, sehingga total sudah kurang lebih 1200 gram yang ia edarkan. Di awal januari, masih di jaringan pengedar yang sama, tertangkap 1 pengedar yang dikejar dari Pelabuhan

Ratu dan tertangkap di Cisaat, diamankan 12 paket. Kami mengategorikan paket-paket narkoba ini dengan istilah paket kelinci, paket kambing dan paket sapi berdasarkan jumlah berat atau dosis paket narkobanya.” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kewenangan yang dilakukan oleh BNNK Sukabumi dalam menanggulangi kejahatan narkoba. Menurut Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si., dalam menangani kejahatan narkoba, BNN tingkat Kabupaten memiliki kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik, namun tidak dapat dipungkiri kurangnya sarana terkadang membuat BNNK membutuhkan bantuan dari BNN di tingkat yang lebih tinggi. Berikut pernyataan kepala BNNK sukabumi kepada peneliti:

“BNN, baik tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten memiliki wewenang lidik dan sidik. Bila kasusnya dalam hal sindikat, maka BNNK berkoordinasi dengan BNNP dan BNN. Seperti kasus baru-baru ini, kami mendapatkan backup dari pusat karena kasus ini merupakan kasus jaringan narkoba. BNN sendiri mengurusnya lebih ke arah sindikat, berbeda dengan penyalahgunaan narkoba, seperti pengguna, maka menjadi urusan lokal (BNNK saja). Bila sudah urusannya sindikat atau jaringan, maka harus berkoordinasi dengan seluruh tingkat BNN karena skalanya lebih luas dan terencana dengan sangat baik oleh para pengedarnya. Namun bila BNNK sanggup dalam hal lidik dan sidik sendiri, BNNK memiliki wewenang tersebut. Namun terkadang perlu bantuan, seperti contohnya tenaga IT, misalnya berhubungan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, atau interdiksi jaringan, BNNK tidak memiliki alat atau sarana yang mumpuni, sehingga harus melibatkan pusat karena yang memiliki saranya hanya BNN pusat.” (**wawancara**

**Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si.
tanggal 24 Januari 2022)**

Hal ini sejalan dengan pernyataan Kasat Polairud Polres Sukabumi, bahwa setiap instansi yang memiliki kewenangan bisa langsung menindak di daerah tersebut tanpa harus menunggu perizinan dari instansi lain, sebagaimana diungkapkan oleh beliau:

“Mengenai penindakan itu, sebenarnya siapa saja yang duluan dan memiliki kewenangan, silahkan saja. Tidak perlu menunggu perizinan karena pada dasarnya mereka memiliki kewenangan tersebut di bidangnya sendiri. Misalnya BNN, mereka berhak melakukan penindakan di tindak pidana narkobanya. Akan lebih baik lagi bila bersama-sama menindak, itu dalam bentuk kerjasama berarti, misalnya dalam hal penyelundupannya, itu kan menjadi cakupan tugas Polairud juga, TNI AL juga. Jadi tidak apa-apa selama masih dalam cakupannya. Tidak tumpang tindih lah, apalagi saling mengandalkan itu harusnya tidak ada.” **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai prosedur penindakan yang dilakukan oleh BNNK Sukabumi. Menurut Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. yang terpenting dari penindakan adalah laporan dari informan dan proses pemetaan yang dilakukan bagian pemberantasan. Seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“Biasanya kami punya informan, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Yang paling berperan adalah laporan dari masyarakat. Selain itu divisi pemberantasan memiliki fungsi pemetaan, sehingga ada peta kejahatan yang sudah terjadi. Setelah dilakukan pemetaan, dilakukan lidik. Ketika diselidiki dan sudah terlihat pola kejahatan dan tersangkanya, dilakukan sidik hingga tertangkap. Sebagai contoh kasus yang sekarang sedang ditangani, prosesnya

sudah cukup lama dari november 2021.” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Sedangkan menurut Kasat Polairud Polres Sukabumi, AKP Tri Andri Affandi, mereka melakukan penindakan berdasarkan KUHAP yang berlaku, yang menjadi acuan bagi Polairud, seperti yang diungkapkan oleh beliau:

“apabila ada tindak pidana yang kita temukan, kita bergerak berdasarkan hukum yang berlaku, berdasarkan KUHAP. Kita lakukan penyidikan, penyelidikan, lalu bila terbukti, kita proses secara hukum. SOP kita ya berdasarkan KUHAP saja.” (**Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022**)

Lebih lanjut informan dari Polairud menyatakan bahwa selama ini penindakan kejahatan narkoba yang dilakukan Polairud biasanya dilimpahkan langsung ke Polres,

“Dalam penindakan di laut ya, kita biasa melakukan penindakan, misalnya bersama dengan TNI, kalau masalah narkoba kita bersama dengan sat narkoba dari Polres, kita sebagai salah satu fungsinya menyediakan transportasi di laut berupa kapal laut, atau perahu. Selanjutnya diluar hal tersebut biasanya langsung dibawa ke Polres dan ditangani oleh Polres langsung. Kami hanya fasilitator, dan itupun kalau berkaitan dengan kejahatan di laut. Ketika sudah sampai ke darat, ada yang punya kapasitas yang lebih mumpuni. Kalau kita yang turun langsung biasanya lebih ke kecelakaan di laut, Patroli, dan lain-lain.” (**wawancara Bripka Rustian, 27 Januari 2022**)

Begitu pun yang diungkapkan oleh informan dari POS AL, bahwa untuk menindak lebih lanjut dalam pengungkapan suatu kasus, semua itu dilimpahkan ke kepolisian.

“Seandainya ada kejahatan, narkoba misalnya, kita tangkap dan tangani, kita sidik dulu di POSAL dengan memanggil penyidik, lalu kita serahkan ke kepolisian untuk selanjutnya. Itu kan urusan hukum kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut.” **(Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022)**

Disamping penindakan, tentu dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba juga ada pencegahan. Dalam hal pencegahan ini upaya mayoritas yang dilakukan adalah pendekatan kepada masyarakat, dalam bentuk penyuluhan dan edukasi mengenai kejahatan narkoba. Salah satu informan menyatakan bahwa pendekatan kepada masyarakat lebih dinilai efektif daripada patroli yang insidental

“kita banyak memberikan pengarahan, komunikasi sosial, baik itu dengan potensi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, nelayan, tokoh adat di masyarakat pesisir pantai. Karena pendekatan dengan masyarakat itu perlu, dan menurut saya jauh lebih baik dengan cara itu daripada kita patroli sering-sering. Kita sering turun ke lapangan, ke masyarakat, biasanya kalau berhubungan dengan narkoba itu kita dengan BNN sebagai yang punya kewenangan masalah itu, dengan polres, kita berhubungan baik dengan tokoh-tokoh masyarakat. Sering saya lihat itu BNN buat poster, baligo, yang ditempel-tempel di pusat berkumpulnya masyarakat itu. Langkah yang bagus menurut saya” **(wawancara dengan Kopka Sani Prayoga, 26 Januari 2021)**

Informan dari BNNK Sukabumi menyatakan bahwa BNN memiliki 3 pendekatan dalam upaya pemberantasan narkoba, yaitu *Demand Reduction Approach*, *Hard Power Approach*, dan *Smart IT approach* yang saling berkaitan. Kepala BNNK menyatakan bahwa ketiganya harus berjalan bersama-sama terkait upaya pencegahan tersebut.

“Kepala BNN RI memiliki kebijakan *Soft Power*, yang merupakan *Demand Reduction approach*, berupa mengajak semua kalangan bersinergi dalam perang melawan narkoba, baik dari kepala desa, camat, bidang pendidikan, dan dunia usaha. Sehingga yang belum menyentuh narkoba, jangan sampai mencoba narkoba. Yang kedua adalah Rehabilitasi, yang masih merupakan *Demand reduction*. Rehabilitasi adalah penanganan orang-orang yang pernah menggunakan narkoba, sehingga dilakukan pengobatan, sesuai salah satu motto kami “ayo rehabilitasi gratis”, dibiayai pemerintah. Kami juga mengajak desa-desa untuk membuat IBM, Intervensi Berbasis Masyarakat, sehingga dari masyarakat tersebut bisa dilakukan rehabilitasi skala kecil. Kami ajarkan untuk deteksi dini pengguna narkoba maupun pengedar. Karena pecandu ini merupakan penyakit otak bernama *Disease Relapse Chronic*, sehingga tidak ada kata sembuh bagi pecandu, yang ada adalah pulih, ada kalanya ia kembali menggunakan narkoba bila tidak ada dukungan dari masyarakat sekitar untuk menjauhi hal tersebut, sehingga masyarakat harus ambil bagian dan empati.

Yang kedua adalah dari segi *Hard Power Approach* yang menjadi tugas divisi pemberantasan, pengedaran narkoba harus dibasmi hingga ke akar-akarnya. Seperti kejadian Desember 2021 lalu, saya minta harus cari lagi barang bukti, karena sesuai *assesmentnya* tersangka sudah mengedarkan hingga 1200 gram, sedangkan yang tertangkap baru 50 gram. Sesuai keterangan tersangka memang ada 1 kilogram lebih, namun kami masih mencari keberadaannya hingga sekarang.

Yang ketiga adalah *Smart IT approach*, di era revolusi digital 4.0 ini kita tidak bisa lepas dari teknologi IT. Teknologi ini menjadi suatu kebutuhan bukan lagi sesuatu yang

sampingan. Proses penanggulangan kita lakukan diantaranya melalui penyiaran, dan hal hal yang melibatkan teknologi informasi diantaranya media-media elektronik termasuk media sosial.

Tiga kebijakan tersebut harus dilakukan bersama-sama, tidak bisa satu kebijakan porsinya lebih tinggi dari kebijakan lainnya. Tidak bisa demand reductionnya sukses namun dari segi hard powernya tidak maju, karena semua itu berkaitan dan saling mendukung. *Demand reduction* dapat dimaksimalkan ketika *hard power* dan *smart IT approachnya* juga jalan. Begitu juga sebaliknya, karena *demand* terhadap narkoba akan ada bila *supplynya* ada, begitu pula sebaliknya. Maka kita harus atasi keduanya secara bersamaan. Kesuksesan satu *approach* menjadi kesuksesan bagi yang lainnya juga. **(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)**

Program yang dilakukan oleh BNNK sendiri salah satunya adalah Desa Bersinar, yang merupakan singkatan dari Desa Bersih dari Narkoba. Berikut keterangan dari informan mengenai program tersebut:

“Kami memiliki program yaitu DESA BERSINAR, yang merupakan singkatan dari Desa Bersih dari Narkoba. Program ini merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan *Demand reduction* bagian *soft power approach*. Bila desa-desa kita yang sangat banyak ini bersih dari narkoba, dan desa-desa ini bergerak bersamaan untuk menangkal narkoba, maka Indonesia juga akan BERSINAR, bersih dari narkoba. Dari mulai satu desa, dimana ada komitmen dari kepala desanya, ada regulasi yang berlaku, ada satgas anti narkobanya, ada kegiatan-kegiatan pencegahan, rehabilitasi, pemberantasan melalui polsek-polsek terdekat. Bila desanya komitmen, perangkat desanya

komitmen, masyarakatnya mendukung, maka jadilah itu desa bersinar, dan desa bersinar ini merupakan pelaksanaan dari instruksi presiden.

Bila 381 desa ditambah 5 kelurahan di Sukabumi ini bergerak, maka jadilah kabupaten sukabumi bersinar. Jargon BNNK Sukabumi adalah MENGEJAR SIBENAR, Mengejar Sukabumi Bersinar. Bila ditambah *Smart IT Approach* di tingkat nasional maka menjadi Sistem Informatika Bersih dari Narkoba.

Dari hasil penelitian BNN dan LIPI, desa rawan narkoba dan tidak rawan narkoba dilihat dari jumlah kegiatannya, jadi desa yang tidak rawan narkoba itu desa yang aktif, banyak program, banyak prestasinya, sehingga tidak ada peluang untuk terkontaminasi narkoba. Sebenarnya tujuan DESA BERSINAR itu seperti itu. Kita juga mencanangkan tempat kerja Bersinar karena sukabumi ini banyak sekali pabrik-pabrik. Dan nanti semester dua kita ingin mewujudkan zona integritas, bagaimana BNNK mempersiapkan segala sesuatunya, dengan teknologi-teknologi yang ada membuat gebrakan seperti pasar Bersinar, lapas Bersinar, pantai Bersinar, dan lain-lain.” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Sedangkan yang dilakukan oleh Polairud dalam rangka pencegahan penyelundupan narkoba ini adalah dengan memberikan penyuluhan, patroli laut, dan membentuk jaringan informasi dengan masyarakat

“Mengenai penyuluhan narkoba di daerah pesisir, memang daerah laut itu rawan terhadap penyelundupan narkoba. Apalagi kita berbatasan dengan Australia, laut bebas, kapal-kapal yang melintas cukup banyak. Tentunya polair melakukan antisipasi diantaranya melakukan patroli di laut, di pesisir, janga sampai barang-barang tersebut masuk ke daerah sukabumi. Disamping itu, kita melakukan penyuluhan

terhadap masyarakat pesisir tentang bahaya narkoba, agar mereka tidak membantu penyeludup-penyeludup untuk memasukkan barang ke wilayah sukabumi.

Karena wilayah Sukabumi cukup luas, 128 kilometer garis pantainya, tentunya kita tidak mungkin bekerja sendiri karena personil kita terbatas, kita tentunya menggandeng potensi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat di daerah pesisir untuk sama-sama mencegah, jangan sampai narkoba masuk ke daerah Sukabumi.” **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Informan dari Polairud juga menambahkan bahwa peran serta masyarakat dalam membasmi kejahatan narkoba di pesisir kabupaten Sukabumi sangat dipengaruhi oleh keinginan masyarakatnya untuk terlibat

“Masyarakat bila diajak untuk bersama-sama memerangi narkoba, sebenarnya tergantung dari seberapa besar upaya kita untuk masuk ke masyarakatnya. Seperti kita tahu bahwa seringkali masyarakat terlibat dalam penyelundupan narkoba, penyeludup itu bisa pinjam kapalnya, dan nelayan itu ada yang tau, ada yang tidak tahu kalau kapalnya itu digunakan untuk menjemput narkoba di tengah laut begitu. Mereka itu uangnya banyak yang didapat kalau kapalnya dipinjam itu, uang sewanya. Bisa sama besarnya dengan hasil mereka melaut dalam sehari. Karena faktor ekonomi, ya mereka lebih memilih tutup mulut kalau mengetahui ada hal seperti itu. Sebenarnya upaya yang baik itu bagaimana kita, penegak hukum dalam masalah narkoba ini, memberikan mereka edukasi, pengetahuan bahwa narkoba itu tidak baik. Bukan hanya berkata “jangan”, mereka seringkali tidak mendengarkan kalau ada larangan seperti itu.” **(wawancara Bripka Rustian, 27 Januari 2022)**

Lebih lanjut mengenai patroli, informan dari POS AL memberikan keterangan yang menyimpulkan bahwa kegiatan patroli juga dilakukan

dalam rangka menjaga keamanan di daerah pesisir kabupaten Sukabumi, termasuk dalam hal pencegahan terhadap masuknya narkoba dari laut.

“Kalau patroli seminggu 2 kali, selama lima jam biasanya, kalau sehat juga kondisi speedboatnya. Kita ada patroli mandiri, ada juga patroli gabungan, dengan Polairud, dengan Dinas Perhubungan Laut, Syah Bandar, Dinas Perikanan, juga ada operasi SAR yang gabungan juga. Patroli gabungan itu sesuai kebutuhan dan sesuai undangan saja, sesuai anggaran juga. Ada yang sebulan itu seminggu patroli, kadang 2 bulan tidak patroli. Dalam patroli juga tidak bisa jauh, ombaknya besar, kadang cuacanya juga menghambat. Itu untuk kapal yang kecil. Kalau kapal yang besar itu tidak ada dermaga yang cukup untuk sandar.
(Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Maret 2022)

Dalam penyelenggaraan pencegahan kejahatan narkoba, ada beberapa kendala yang dihadapi, antara lain kurangnya *awareness* dari kepala daerah yang dilibatkan, seperti yang diungkapkan oleh informan dari BNNK Sukabumi:

“Dalam pencegahannya, belum semua kepala desa *aware* akan bahaya narkoba ini. Mereka menganggap urusan narkoba urusan BNN, hal ini yang harus dihilangkan, karena dalam perang melawan narkoba kita harus jalan bersama-sama, tidak bisa hanya BNN saja.” **(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)**

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai rencana kedepannya dalam menanggulangi kejahatan narkoba, berikut pernyataan informan BNNK Sukabumi:

“Dari hasil penelitian BNN dan LIPI, desa rawan narkoba dan tidak rawan narkoba dilihat dari jumlah kegiatannya, jadi desa yang tidak rawan narkoba itu desa yang aktif, banyak

program, banyak prestasinya, sehingga tidak ada peluang untuk terkontaminasi narkoba. Sebenarnya tujuan dasar bersinar itu seperti itu. Kita juga mencanangkan tempat kerja bersinar karena sukabumi ini banyak sekali pabrik-pabrik. Dan nanti semester dua kita ingin mewujudkan zona integritas, bagaimana BNNK mempersiapkan segala sesuatunya, dengan teknologi-teknologi yang ada membuat gebrakan seperti pasar bersinar, lapas bersinar, pantai bersinar, dan lain-lain.” (wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)

4.2.2. *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi

Dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba, diperlukan campur tangan dari seluruh pihak, terutama penegak hukum yang juga melibatkan masyarakat. Pada penelitian ini, peneliti mengkhususkan pada *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi. Peneliti mewawancarai informan dari BNNK Sukabumi, dengan menanyakan mengenai bagaimana koordinasi yang telah di bangun, baik dengan instansi lain secara umum maupun secara khusus dengan Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“BNNK Sukabumi menjalin kerjasama dengan semua instansi dalam pemberantasan narkoba ini, termasuk kita sudah punya tim terpadu dengan anggota yaitu kepala-kepala dari 43 instansi termasuk Dandim, Polres, dan lain-lain. Di tandatangani dan diketuai oleh Bupati langsung. Tim terpadu ini dipayungi oleh Perda no. 4 tahun 2020 dengan rencana aksi baru dibuat tahun 2021. Sosialisasinya baru akan dilakukan awal tahun 2022 ini. Walaupun dana untuk ini tidak ada, namun kami tetap jalankan. Yang penting aksinya.

Jadi tidak hanya dengan aparat penegak hukum, namun juga dengan pemerintah-pemerintah daerah dari mulai Lurah, Camat, hingga Bupati. Bahkan juga dengan ormas ormas seperti karang taruna dan FSSKS (Forum Silaturahmi Sukabumi Sehat).” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Lebih lanjut peneliti menanyakan mengenai bagaimana hubungan yang telah terjalin dengan instansi-instansi tersebut. Berikut yang diungkapkan oleh Kepala BNNK Sukabumi:

BNNK Sukabumi dengan instansi-instansi lain memiliki hubungan yang cukup baik. Sebagai contoh ketika tersangka penyeludup atau pengedar narkoba ditangkap dan ditahan di BNNK kita hanya punya waktu 3 hari, kita harus berkoordinasi dengan lapas. Sebelum administrasi selesai, saya telpon kepala lapasnya, jadi via lisan dulu, kami mau menitipkan 1 tahanan. Hal ini kembali lagi pada komunikasi kami yang terjalin baik, sehingga dapat mempercepat proses juga. Tidak perlu menunggu administrasi selesai kami sudah bisa menitipkan tahanan ini. Bila tidak begitu, selain waktunya lebih lama, menahan seorang manusia itu perlu anggaran, contohnya anggaran makan tahanan tersebut, dan lain-lain.

Dengan kejaksaan juga, dengan komunikasi yang telah terjalin dengan baik kita bisa langsung upayakan untuk proses pengadilannya, karena bila mengikuti alur itu akan sangat lama. Bisa memakan waktu 2 bulan hanya untuk proses pemberkasan saja.

Hal ini didukung oleh SDM BNNK sukabumi yang cukup mumpuni untuk berkomunikasi dan bersinergi dengan instansi-instansi lain. (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Peneliti menanyakan hal yang sama kepada Kasat Polairud Polres Sukabumi, secara garis besar koordinasi antar lembaga yang dibangun oleh Polairud Polres Sukabumi sudah cukup baik, terbukti dengan banyaknya kerjasama antara Polairud dengan instansi TNI AL, Pemerintah, dan masyarakat. Berikut hasil wawancara peneliti:

“Biasanya kita ada koordinasi dengan instansi lain, misalnya dengan TNI angkatan laut, pemerintah kabupaten maupun kecamatan, dan desa, di sekitar pesisir pantai. Kalau dengan TNI AL, kita sering kerjasama dalam bentuk patroli gabungan, bersama dengan beberapa dinas juga seperti dinas perikanan, dinas perhubungan laut, dan lain-lain. Kalau dengan pemerintah dan masyarakat kita biasanya bersama-sama mengadakan penyuluhan, baik ke masyarakat, ke kampung nelayan, ke sekolah, ke pasar kadang-kadang, seperti itu.” **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Hal ini didukung oleh pernyataan dari informan POS AL bahwa pihaknya sering mengadakan patroli bersama atau patroli gabungan dengan Polairud Polres Sukabumi, seperti yang dinyatakan informan sebagai berikut:

“Kita ada patroli mandiri, ada juga patroli gabungan, dengan Polairud, dengan dinas perhubungan laut, syah bandar, dinas perikanan, juga ada operasi SAR yang gabungan juga. Patroli gabungan itu sesuai kebutuhan dan sesuai undangan saja, sesuai anggaran juga. Ada yang sebulan itu seminggu patroli, kadang 2 bulan tidak patroli. Tapi dalam satu tahun itu sering patroli gabungan, dan memang seringnya itu dengan Polairud karena posisi kita dekat, hubungan baik juga dengan Polairud” **(Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022)**

Selanjutnya peneliti menanyakan secara khusus koordinasi antar lembaga antara BNNK dan Polairud Polres Sukabumi. Kepala BNNK

Sukabumi menyatakan saat ini tidak ada hubungan langsung antara BNNK Sukabumi dengan Polairud Polres Sukabumi, seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

“Dilihat dari garis pantai sukabumi yang panjang, saya berpikir bahwa kita harus menggandeng Polairud juga, dalam upaya pencegahan dan penindakannya. Bahkan saya baru tau bahwa Polairud itu dibawah Polres, selama ini saya oikir Polairud itu dibawah Dinas KKP.

Karena kita punya program Desa Bersinar dan Kampung tangguh, kita harus bergandengan tangan agar menjadi program yang menjadi satu kesatuan agar desanya juga tidak bingung dan kesusahan dengan banyaknya program dari instansi yang berbeda.

Namun hingga sekarang, kerjasama dengan polairud belum terbentuk. Selama ini bila berkaitan dengan nelayan dan pesisir, BNNK lebih mengutamakan menggandeng organisasi-organisasi nelayan, dan sudah berjalan dengan sangat luar biasa. Harapannya kedepannya kita bisa menggandeng Polairud juga dalam program ini.
(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)

Hal ini berbeda dengan yang diungkapkan oleh Kasat Polairud Polres Sukabumi, dimana beliau menyatakan bahwa selama ini koordinasi dengan BNNK Sukabumi sudah terjalin dengan baik. Berikut hasil yang peneliti peroleh dari wawancara dengan informan:

“Kita sering bertukar informasi, bila ada hal yang mencurigakan atau apa, kita sering berkoordinasi. Bahkan BNN sering ke kantor Polairud, kerjasama untuk melaksanakan patroli bersama dengan sat narkoba. Kita sering ke laut bersama-sama, kira-kira ada kapal yang mencurigakan, kita periksa.

Dan hubungan tersebut sudah cukup baik dan terjalin sudah cukup lama, sebelum saya Kasat disini juga sudah sering kerjasama. Termasuk dengan instansi-instansi lain juga, kita hanya melanjutkan saja apa yang sudah di jalin sebelumnya.” **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Berbeda pula yang diungkapkan oleh wakil komandan POS AL, informan menyatakan bahwa sejak Indonesia terjadi pandemi, belum ada kerjasama yang terjalin yang melibatkan POS AL, Polairud, dan BNNK. Berikut pernyataan informan:

“Untuk kerjasama dengan BNNK, biasanya kita ada saling bertukar informasi, yang melibatkan juga Polairud, Polres juga, kita sering bertukar informasi dengan BNNK, walaupun sudah setahun lebih ini belum ada lagi, semasa pandemi belum ada lagi. Selain itu ada juga upaya cegah dini dengan BNNK, dan membahas kerawanan-kerawanan. Hubungan dengan BNNK juga cukup baik.” **(Wawancara Serma (Kom) Wahyudin, tanggal 27 Januari 2022)**

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai kendala yang dihadapi dalam membangun *interagency coordination* dengan instansi-instansi tersebut. Berikut pernyataan dari kepala BNNK Sukabumi:

Kendalanya antara lain ego sektoral pasti ada, tetapi yang disyukuri adalah komitmen dari pimpinan. Tanpa dukungan dari bupati atau walikota, akan lebih susah jalannya. Semua bisa berjalan cepat karena support yang besar dari pimpinan yang berkomitmen luar biasa tidak hanya secara verbal namun juga kucuran anggaran.

Ketika instansi berganti pimpinan, kami harus mulai dari awal. Namun karena ada dokumentasi pekerjaan sebelumnya, maka akan cepat. Walaupun sejauh ini belum ada pimpinan baru yang tidak respon tentang hal ini.

Dari komunikasi antar instansi, kendala yang dihadapi itu kembali lagi pada pemikiran bahwa narkoba itu urusannya BNN, namun yang diharapkan adalah urusan narkoba dikerjakan bersama-sama. Namun andaikan memang dibebankan kepada BNN pun, asal sukabumi bersih dari narkoba, kami akan kerjakan. **(wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022)**

Peneliti juga menanyakan mengenai upaya peningkatan *interagency coordination* tersebut, berikut pernyataan informan dari Polairud Polres Sukabumi:

“Harapannya kedepannya Polairud dapat menjalin kerjasama dan sinergi lebih baik dengan instansi lain terutama BNNK, dengan cara kita bersama-sama sering berkumpul, melakukan pertemuan, kita bicarakan mengenai potensi penyelundupan, potensi pencegahan yang kita juga gandeng masyarakat yang terpenting itu saling berkomunikasi menurut saya. Kalau komunikasi sudah terjalin, sudah saling mengetahui kebutuhan masing-masing instansi, yang nantinya melibatkan kita di Polairud, ya kita barengi. Selama kita bisa bantu, kita bantu. Begitu juga sebaliknya apabila kita butuh bantuan dari instansi-instansi tersebut, kalau komunikasinya sudah lancar jadi mudah. **(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)**

Hal ini juga disepakati oleh pernyataan informan dari BNNK Sukabumi, yang menyatakan bahwa komunikasi menjadi landasan penting dalam bersinergi. Berikut pernyataan informan kepada peneliti:

“ya memang untuk meningkatkan sinergi ini kita perlu yang namanya hubungan baik, menjalin komunikasi dengan instansi lain, yang selanjutnya kita bisa berkoordinasi juga. Seperti contohnya tadi, hubungan BNNK Sukabumi dengan

Lapas dan Kejaksaan juga bisa lancar karena ada komunikasi yang baik diantara kita. Selain itu juga untuk meningkatkan sinergi itu kita bisa menghilangkan sedikit demi sedikit ego sektoral, keyakinan bahwa satu masalah itu menjadi tugas hanya 1 instansi. Konsep sinergi kan satu masalah kita keroyok bareng-bareng. Dalam sinergi dengan Polairud juga saya selanjutnya akan mulai menjalin komunikasi dengan Polairud, agar nanti program-program kami yang targetnya di laut atau di pesisir begitu juga dapat melibatkan Polairud juga sebagai yang punya wilayah disana” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai perencanaan kedepannya yang dilakukan BNNK Sukabumi dalam upaya koordinasi dengan pihak lainnya, informan BNNK Sukabumi menyatakan bahwa akan banyak program yang dilakukan di masa depan dalam meningkatkan koordinasi dengan instansi-instansi lain, seperti yang diungkapkan oleh beliau:

Dari segi kerjasama instansi, arahan kepala BNN adalah perbanyak kerjasama. Sebagai contoh januari ini ada kerjasama dengan Forum Kebangsaan, FKDM, MoU dengan PMI, karang taruna, KNPI, dan lain-lain. Harapannya MoU tidak hanya MoU Slip, hanya di kertas. Kami akan tagih bagaimana kelanjutannya. Kami juga akan melakukan pelantikan satgas anti narkoba tingkat kecamatan dan desa, kelanjutannya adalah pantai bersinar, pembentukan kampung tangguh dan kampung donor, hal ini terjadi karena pemimpin-pemimpinnya mau untuk bersama-sama bergerak.” (**wawancara Dr. (Cand). M. Retno Daru Dewi, AMK., S.Psi., M.Si. tanggal 24 Januari 2022**)

Sedangkan informan Polairud Polres Sukabumi menyatakan sebagai berikut:

“Harapannya kedepannya Polairud dapat menjalin kerjasama dan sinergi lebih baik dengan instansi lain terutama BNNK, dengan cara kita bersama-sama sering berkumpul, melakukan pertemuan, kita bicarakan mengenai potensi penyelundupan, potensi pencegahan yang kita juga gandeng masyarakat yang terpenting itu saling berkomunikasi menurut saya. Kalau komunikasi sudah terjalin, sudah saling mengetahui kebutuhan masing-masing instansi, yang nantinya melibatkan kita di Polairud, ya kita barengi. Selama kita bisa bantu, kita bantu. Begitu juga sebaliknya apabila kita butuh bantuan dari instansi-instansi tersebut, kalau komunikasinya sudah lancar jadi mudah.”
“(Wawancara AKP Tri Andri Affandi tanggal 27 Januari 2022)”

4.3. Hasil Pengolahan Data

Hasil Pengumpulan data diolah hingga menghasilkan tematik hubungan dalam bentuk kategorisasi. Analisis data disajikan dalam bentuk tabel untuk selanjutnya diinterpretasi.

4.3.1. Potensi Ancaman dan Pola Kejahatan Narkoba di Pesisir Kabupaten Sukabumi serta Upaya Penanggulangannya

Peneliti mengkategorisasikan data temuan dalam pertanyaan penelitian ini dalam 4 kategori, yaitu ancaman, upaya penanggulangan, dan kendala.

Tabel 4.1 Pengolahan Data Potensi Ancaman, Pola Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkoba

| | BNNK Sukabumi | Polairud Polres Sukabumi | POS AL Sukabumi |
|----------------|---|---------------------------------|------------------------|
| Ancaman | <ul style="list-style-type: none"> - Pesisir Sukabumi menjadi jalur penyelundupan narkoba karena berbatasan langsung dengan laut lepas dan negara lain - Banyak kasus penyelundupan narkoba terungkap melalui jalur ini - Keterlibatan masyarakat, terutama nelayan, baik yang tidak mengetahui maupun yang mengetahui | | |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| Penindakan | Penggalian informasi, pemetaan, lidik dan sidik | Melakukan SOP sesuai KUHAP | Penyidikan terbatas, lalu diserahkan ke kepolisian |
| Pencegahan | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Demand Reduction (Soft Power approach dan rehabilitasi)</i> - <i>Hard Power Approach</i> - <i>Smart IT Approach</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan - Edukasi - Jaringan komunikasi masyarakat - Patroli laut | <ul style="list-style-type: none"> - Pengarahan, komunikasi sosial, - Patroli Laut |
| Kendala | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya <i>awareness</i> kepala desa mengenai bahaya narkoba, sehingga menghambat program. - Jumlah personil dan sarana prasarana kurang memadai - Paradigma bahwa Narkoba hanya urusan BNN | <ul style="list-style-type: none"> - Pesisir Kabupaten Sukabumi memiliki ombak yang tinggi, sulit untuk melakukan patroli secara kontinyu - Kurangnya SDM dan sarana prasarana, | <ul style="list-style-type: none"> - Sarana yang kurang - Ombak tinggi |

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

4.3.2. *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi

Peneliti mengkategorisasikan hasil temuan dalam penelitian berdasarkan indikator koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yaitu Komunikasi, Kesadaran Lembaga, Komitmen, dan Kontinuitas perencanaan, serta kendala.

Tabel 4.2 Pengolahan Data *Interagency Cooperation* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi

| | BNNK Sukabumi | Polairud Polres Sukabumi | POS AL Sukabumi |
|---------------------------------|---|---|---|
| Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> - Dengan instansi lain cukup baik - Dengan masyarakat cukup baik - Dengan polairud belum ada komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> - Dengan instansi lain cukup baik - Dengan masyarakat cukup baik - Dengan BNNK dan POS AL cukup baik | <ul style="list-style-type: none"> - Dengan Muspida Cukup Baik, - Dengan Polairud dan BNNK cukup baik |
| Kesadaran Lembaga | <ul style="list-style-type: none"> - Dalam upaya terselenggaranya P4GN, BNNK Sukabumi perlu menjalin koordinasi dengan pihak penegak hukum, pemerintah daerah, masyarakat, maupun swasta. - Perlu adanya hubungan dengan pihak Polairud Polres Sukabumi untuk menjalankan program-program di daerah Pesisir Kab. Sukabumi | <ul style="list-style-type: none"> - Dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba, perlu adanya kerjasama antara Polairud dengan instansi-instansi lain dalam bentuk patroli gabungan, dan dengan masyarakat dalam bentuk penyuluhan, edukasi, dan jaringan informasi. - Koordinasi dengan BNNK Sukabumi dibutuhkan untuk membahas kerawanan-kerawanan daerah Kab. Sukabumi | <ul style="list-style-type: none"> - Perlu adanya saling kerjasama dalam mengatasi kejahatan narkoba, dengan muspida, dengan instansi-instansi lain. |
| Kesepakatan dan Komitmen | <ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Terpadu yang berisi 43 kepala instansi - MoU dengan organisasi masyarakat | <ul style="list-style-type: none"> - Patroli Gabungan, bersama dengan instansi-instansi terkait, - Dengan BNNK belum ada komitmen | <ul style="list-style-type: none"> - Komitmen dengan beberapa instansi untuk patroli bersama, - Dengan BNNK sebatas membahas |

| | | | |
|--------------------------------|--|---|---|
| | - Belum ada komitmen tertentu dengan Polairud Polres Sukabumi | tertentu dalam penanggulangan penyelundupan narkoba. | kerawanan-kerawanan saja |
| Kontinuitas perencanaan | - Menganangkan tempat kerja Bersinar, pewujudan Zona Integritas, membuat gebrakan pasar Bersinar, Lapas Bersinar, dan lain-lain. Selain itu pelantikan satgas anti narkoba tingkat kecamatan dan desa, - Memulai komunikasi dengan Polairud Polres Sukabumi | - Koordinasi lebih baik dengan instansi-instansi lain. - Mulai menjalin komunikasi dengan baik dengan BNNK Sukabumi. | - Koordinasi dengan instansi lain lebih baik untuk menjaga daerah pesisir sukabumi tetap aman |
| Kendala | - Paradigma bahwa Narkoba urusan BNN | - Kurang komunikasi terutama pada 2 tahun terakhir pada masa pandemi | - Sejak pandemi, komunikasi terputus |

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

4.4. Hasil Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tiga aktivitas menurut Miles, Huberman, & Saldana (2014). Aktivitas pertama yaitu kondensasi data, yang dijabarkan pada subbab Hasil Pengumpulan Data. Sementara itu, aktivitas kedua yakni penyajian data, yang ditampilkan pada subbab Hasil Pengolahan Data dan Hasil Analisis Data. Adapun aktivitas ketiga analisis data ialah penarikan dan verifikasi kesimpulan, yang diuraikan pada subbab Interpretasi Data dan Pembahasan.

4.4.1. Potensi Ancaman dan Pola Kejahatan Narkoba di Pesisir Kabupaten Sukabumi serta Upaya Penanggulangannya

Peneliti mengkategorisasikan analisis data dalam pertanyaan penelitian ini dalam 3 kategori, yaitu ancaman, upaya penanggulangan, dan kendala.

Tabel 4.3 Analisis Data Potensi Ancaman, Pola Kejahatan dan Upaya Penanggulangan Penyelundupan Narkoba

| | Subtema |
|-------------------|---|
| Ancaman | <ul style="list-style-type: none"> - Penyelundupan marak terjadi, bukan merupakan jalur baru - Keterlibatan nelayan menjadi salah satu faktor |
| Penindakan | <ul style="list-style-type: none"> - Penindakan yang dilakukan sudah sistematis |
| Pencegahan | <ul style="list-style-type: none"> - Pencegahan telah banyak dilakukan dengan berbagai bentuk |
| Kendala | <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya SDM, Sarana Prasarana, dan kesadaran masyarakat |

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

4.4.2. *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi

Peneliti mengkategorisasikan hasil temuan dalam penelitian berdasarkan indikator koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yaitu Komunikasi, Kesadaran Lembaga, Komitmen, dan Kontinuitas perencanaan, serta kendala.

Tabel 4.4 Analisis Data *Interagency Coordination* BNNK Sukabumi Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi

| | Subtema |
|--------------------------|--|
| Komunikasi | <ul style="list-style-type: none"> - ketiga instansi secara terpisah memiliki komunikasi yang baik, namun antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi memiliki perbedaan pendapat mengenai pola komunikasi antara keduanya |
| Kesadaran Lembaga | <ul style="list-style-type: none"> - Ketiga instansi menyadari bahwa dalam menangani kejahatan penyelundupan narkoba, perlu saling berkoordinasi baik dengan instansi lain maupun |

| | |
|-----------------------------------|--|
| | antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi. |
| Kesepakatan & Komitmen | - Ketiga instansi telah menjalin komitmen dengan berbagai instansi, namun kesepakatan atau komitmen tertentu belum terjalin dengan baik. |
| Kontinuitas Perencanaan | - Ketiga instansi telah melakukan perencanaan untuk upaya selanjutnya, dan diantara ketiganya akan mulai dilakukan komunikasi untuk menjalin koordinasi di masa depan. |
| Kendala | - Paradigma pemerintah dan masyarakat - Kurangnya/terputusnya komunikasi |

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

4.5. Interpretasi Data

Data diinterpretasi dengan penggabungan hasil analisis dari beberapa aspek dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian

4.5.1. Potensi Ancaman dan Pola Kejahatan Narkoba di Pesisir Kabupaten Sukabumi serta Upaya Penanggulangannya

Peneliti mengkategorisasikan interpretasi data dalam pertanyaan penelitian ini dalam 3 kategori, yaitu ancaman, upaya penanggulangan, dan kendala.

a. Ancaman

Penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi bukan merupakan hal yang baru, meskipun pada tahun 2020 terdapat pernyataan bahwa pesisir kabupaten Sukabumi menjadi jalur baru penyelundupan narkoba, namun faktanya telah banyak penyelundupan narkoba melalui jalur laut, dimana penyeludup mengambil jalur-jalur tikus yang tidak terdeteksi oleh aparat yang berwenang. Daerah pesisir Kabupaten Sukabumi sendiri merupakan salah satu pesisir yang berhadapan langsung dengan laut lepas dan berbatasan dengan negara lain, yaitu Australia. Diketahui bahwa jarak dari pesisir Kabupaten Sukabumi ke

Pulau Christmas yang merupakan daerah teritorial Australia hanya memakan waktu 4 jam. Berbeda dengan Laut Jawa, misalnya, yang masuk ke daerah teritorial Indonesia. Dengan kondisi tersebut, peluang penyelundupan baik narkoba maupun manusia sangat besar.

Keterangan yang diberikan informan menyatakan bahwa beberapa tahun kebelakang sudah banyak penyelundupan narkoba yang terungkap. Salah satu contohnya adalah kasus penyelundupan di Ujung Genteng, dimana barang bukti yang diamankan berjumlah ratusan kilogram sabu-sabu. Contoh lainnya adalah kasus di akhir tahun 2021 dimana seorang pengedar tertangkap dengan barang bukti 25 gram sabu-sabu, yang menurut keterangan informan, barang bukti tersebut hanya sebagian kecil yang terungkap dari sekitar 1200 gram yang telah diseludupkan.

Ancaman berikutnya adalah keterlibatan warga sekitar pesisir Kabupaten Sukabumi dalam penyelundupan tersebut. Dari beberapa kasus yang terungkap, ditemukan bahwa keterlibatan warga pesisir terutama nelayan berupa penyewaan perahu sebagai sarana penjemputan narkoba di tengah laut. Aktivitas tersebut adakalanya diketahui oleh nelayan pemilik perahu maupun tidak. Bagi nelayan yang mengetahui penggunaan kapal mereka yang disewa, mereka memilih diam karena imbalan yang mereka terima setara atau melampaui penghasilan mereka dari hasil melaut atau mencari ikan.

b. Upaya Penanggulangan

Upaya yang dilakukan baik oleh BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi meliputi pencegahan dan penindakan.

1. Pencegahan

Pencegahan yang dilakukan BNNK Sukabumi berupa 3 kebijakan Kepala BNN, yaitu *Demand Reduction* meliputi *Soft power approach* dan Rehabilitasi. **Soft Power**

Approach adalah upaya berupa ajakan kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah, maupun bidang pendidikan dan dunia usaha untuk bersinergi dalam perang melawan narkoba, sehingga bagi yang belum menggunakan narkoba jangan sampai mencoba menggunakannya. Sedangkan **Rehabilitasi** adalah upaya pemulihan pengguna narkoba baik dalam sarana rehabilitasi yang dimiliki BNN maupun rehabilitasi skala kecil di dalam lingkup masyarakat. BNNK Sukabumi mengajak masyarakat untuk membangun Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk melakukan deteksi dini pengguna narkoba dan upaya rehabilitasinya.

Kebijakan kedua adalah **Hard Power Approach**, dimana BNNK Sukabumi berupaya memberantas narkoba hingga ke akar-akarnya, yang menjadi tugas dari Divisi Pemberantasan. Sedangkan kebijakan ketiga adalah **Smart IT Approach**, sebagai upaya pencegahan yang melibatkan media elektronik seperti internet, media penyiaran, media sosial dan lain-lain.

Dalam mewujudkan ketiga kebijakan pencegahan tersebut, salah satu program yang diusung oleh BNNK Sukabumi adalah Desa Bersinar, yang merupakan singkatan dari Desa Bersih dari Narkoba, dimana program ini merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan *Demand Reduction* bagian *Soft Power Approach*, dimana ada komitmen dari para kepala desa, ada regulasi, satgas anti narkoba, dan kegiatan-kegiatan pencegahan, rehabilitasi, serta pemberantasan pada tingkat pemerintahan terendah.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Polairud Polres Sukabumi berdasarkan keterangan informan adalah melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat

mengenai bahaya narkoba, sehingga masyarakat menyadari bahaya tersebut dan tidak membantu para penyeludup dalam memasukkan narkoba ke daerah Kabupaten Sukabumi. Polairud Polres Sukabumi juga membentuk jaringan informasi dengan masyarakat sebagai langkah awal penindakan penyelundupan narkoba. Selain itu, sesuai kapabilitas Polairud sebagai penegak hukum di laut dan pesisir, Polairud secara rutin melakukan patroli laut baik secara mandiri maupun patroli gabungan bersama beberapa instansi seperti TNI AL, Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, dan instansi-instansi lainnya.

POS AL Sukabumi melakukan pencegahan penyelundupan narkoba dengan memberikan pengarahan dan komunikasi sosial dengan masyarakat, khususnya para nelayan dan tokoh adat di pesisir pantai.

2. Penindakan

Dalam hal penindakan, BNNK Sukabumi memiliki strategi operasi, dimana langkah awal yang dilakukan adalah penerimaan informasi dari informan, yang merupakan anggota masyarakat maupun pemerintah setempat. Selain informasi, BNNK Sukabumi juga memiliki peta sebaran dan jalur-jalur penyelundupan di daerah pesisir Kabupaten Sukabumi yang dapat mereka jadikan acuan dalam melacak penyelundupan narkoba. Setelah mendapatkan informasi dan dilakukan pemetaan, BNNK melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut hingga terlihat pola kejahatan dan dugaan tersangkanya. Selanjutnya BNNK Sukabumi melakukan penyidikan hingga kasus diselesaikan dengan penangkapan dan pengadilan tersangka serta penyitaan barang bukti.

Dalam upayanya melakukan penindakan, informan BNNK Sukabumi menyatakan bahwa mereka memiliki

kewenangan untuk melakukan lidik dan sidik, dimana bila kasusnya dalam hal sindikat, BNNK bekerjasama dengan BNNP dan BNN karena tidak memadainya sarana yang dimiliki BNNK. Meskipun begitu, dalam kasus yang dapat ditangani sendiri oleh BNNK, mereka memiliki kewenangan untuk menangani secara langsung.

Informan Polairud Polres Sukabumi menyatakan dalam upaya penindakan, mereka mengikuti SOP berdasarkan KUHP dan undang-undang yang berlaku. Mereka melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penindakan bila terbukti dengan proses sesuai hukum yang berlaku. Menurut Informan Polairud Polres Sukabumi, Penindakan dapat dilakukan oleh instansi manapun yang memiliki kewenangan dalam kasusnya masing-masing. Dalam hal penyelundupan narkoba, BNNK dapat menindak di daerah pesisir tanpa ada kekhawatiran tumpang tindih kewenangan.

Sedangkan POS AL Sukabumi lebih menyerahkan proses penindakan kepada kepolisian. Dalam penindakan suatu kejahatan, langkah yang dilakukan POS AL adalah penyelidikan awal sebagai pendataan, untuk penyelidikan lebih lanjut diserahkan ke pihak kepolisian.

c. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh kedua instansi datang dari keadaan alam, jumlah personil dan sarana prasarana, maupun sosial masyarakat. Informan BNNK Sukabumi menyatakan bahwa kendala yang dihadapi oleh BNNK Sukabumi antara lain ketidaksadaran beberapa kepala desa dalam mewujudkan program yang dicanangkan BNNK Sukabumi seperti Desa Bersinar, karena paradigma yang tertanam di masyarakat bahwa kejahatan narkoba menjadi tanggung jawab BNN sepenuhnya. Selain itu jumlah

personil BNNK Sukabumi yang hanya berjumlah 29 orang yang mencakup Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta sarana prasarana yang tidak mumpuni seperti keadaan kantor BNNK yang tidak ideal bahkan rawan untuk melakukan penahanan sementara tersangka.

Sedangkan Polairud Polres Sukabumi memiliki kendala yang sama dalam aspek personil dan sarana prasarana. Ada 16 orang personil yang harus dibagi dua dalam penugasannya, di kantor pusat Palabuhan Ratu dan di Pos Jaga Ujung Genteng, serta jumlah perahu cepat yang berjumlah 7 buah tidak cukup optimal dalam melakukan penjagaan di daerah pesisir Kabupaten Sukabumi yang sangat panjang. Selain itu, kendala yang dihadapi adalah sulitnya melakukan patroli secara kontinyu dan mendetail karena keadaan alam yang tidak memungkinkan, karena ombak yang besar dan garis pantai yang luas.

Berbeda dengan POS AL Sukabumi, meskipun hanya memiliki 13 orang anggota, 1 speed boat, dan 1 perahu karet, informan POS AL menyatakan bahwa hal tersebut bukan suatu hambatan dalam menjalankan tugas. Satu-satunya hambatan adalah faktor cuaca atau keadaan alam.

4.5.2. *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi

Peneliti mengkategorisasikan hasil temuan dalam penelitian berdasarkan indikator koordinasi menurut Handyaningrat (1991) yaitu Komunikasi, Kesadaran Lembaga, Kesepakatan & Komitmen, dan Kontinuitas perencanaan, serta kendala.

a. Komunikasi

BNNK Sukabumi banyak menjalin komunikasi baik secara formal maupun non formal dengan berbagai instansi. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan informan BNNK Sukabumi bahwa dalam memproses suatu kasus, mereka melakukan komunikasi secara verbal dengan instansi terkait,

misalnya Lembaga Pemasyarakatan dan Kejaksaan sehingga proses kasus tersebut dapat dilakukan dengan waktu yang lebih singkat. Selain itu komunikasi juga dilakukan dengan kepala daerah terendah hingga tertinggi dalam mewujudkan Desa Bersinar.

Sedangkan Polairud Polres Sukabumi melakukan komunikasi dengan para instansi terkait dalam hal pembentukan hubungan baik dalam cakupan wewenang tugas. Selain itu Polairud Polres Sukabumi juga membentuk jaringan informasi kepada masyarakat sebagai ujung tombak informasi pelanggaran yang dilakukan di daerah pesisir Kabupaten Sukabumi.

Informan POS AL Sukabumi menyatakan bahwa komunikasi saat ini sudah cukup baik dengan MUSPIDA, atau instansi-instansi lokal setempat. Termasuk dengan Polairud, POS AL sering bertukar informasi dan berkomunikasi mengenai masalah patroli dan lain-lain. Sedangkan dengan BNNK Sukabumi, informan POS AL menyatakan bahwa apabila berhubungan dengan narkoba mereka berbagi informasi dengan BNNK.

Mengenai komunikasi antara BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi, menurut pernyataan informan BNNK Sukabumi, belum ada komunikasi yang terbentuk antara BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi. Hal ini disebabkan selama ini program-program yang dilakukan BNNK Sukabumi di daerah pesisir Kabupaten Sukabumi lebih banyak menggandeng organisasi masyarakat. Pandangan berbeda diberikan oleh informan dari Polairud Polres Sukabumi. Menurutnya hubungan antara Polairud Polres Sukabumi dengan BNNK Sukabumi telah terbentuk sejak lama, kepemimpinan yang sekarang sifatnya hanya meneruskan apa yang sudah terbentuk di kepemimpinan sebelumnya. Namun sejak pandemi Covid-19, yang juga didalamnya ada pergantian Kepala Satuan, belum ada

komunikasi lebih lanjut. Hal ini dipertegas oleh pernyataan Informan POS AL Sukabumi yang mengatakan sejak Indonesia memasuki masa pandemi, belum ada pertemuan-pertemuan yang membahas kerawanan-kerawanan penyelundupan narkoba bersama BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi.

b. Kesadaran Lembaga

Dalam menangani kejahatan penyelundupan narkoba, baik BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi maupun POS AL Sukabumi menyatakan bahwa diperlukannya koordinasi dengan banyak pihak, termasuk koordinasi antara BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi dalam menjalankan program-program baik dalam rangka penindakan maupun pencegahan penyelundupan narkoba.

c. Kesepakatan & Komitmen

Dalam menjalankan tugas pokoknya, BNNK Sukabumi membangun komitmen dengan banyak pihak, sebagai contoh komitmen dengan para kepala desa dalam menjalankan program Desa Bersinar, pembentukan Tim Terpadu dengan 43 kepala instansi, membentuk MoU dengan instansi-instansi swasta dan organisasi masyarakat.

Sedangkan Polairud menyatakan bahwa pihaknya menjalin kesepakatan dengan instansi-instansi seperti TNI AL (POS AL), Dinas Perikanan, Dinas Perhubungan Laut, Syah Bandar dalam penyelenggaraan patroli gabungan, dan bersama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan dan swasta dalam memberikan penyuluhan mengenai bahaya narkoba. Hal ini hampir serupa dengan yang dilakukan oleh POS AL.

Namun menurut Informan BNNK Sukabumi, antara BNNK Sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi belum terbentuk suatu kesepakatan atau komitmen tertentu dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di

Kabupaten Sukabumi. Hal ini sejalan dengan pernyataan informan Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi bahwa selama ini hubungan dengan BNNK Sukabumi sebatas pertemuan membahas kerawanan-kerawanan daerah Kabupaten Sukabumi.

d. Kontinuitas Perencanaan

Informan BNNK Sukabumi menyatakan bahwa ada banyak perencanaan yang akan dilaksanakan di masa depan, diantaranya memperbanyak kerjasama, sebagai contoh di awal 2022 akan ada MoU dengan Forum Kebangsaan, FKDM, PMI, Karang taruna, KNPI, dan lain-lain. Pihaknya juga akan melantik satgas anti narkoba tingkat desa dan kecamatan, dan realisasi program-program bebas narkoba.

Sedangkan Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi memiliki perencanaan untuk membangun koordinasi dengan lebih baik dengan berbagai pihak dan juga dengan BNNK Sukabumi.

Untuk memulai koordinasi antara keduanya, baik BNNK Sukabumi maupun Polairud Polres Sukabumi akan melakukan komunikasi sebagai landasan untuk membangun koordinasi yang lebih baik.

e. Kendala

Kendala yang dihadapi oleh BNNK Sukabumi dalam bersinergi dengan instansi-instansi terkait adalah terkait ego sektoral yang terjadi diantara instansi-instansi tersebut. Selain itu dalam hubungannya dengan instansi terkait dan masyarakat, BNNK Sukabumi dihadapkan kepada paradigma bahwa masalah narkoba itu hanya urusan BNN, meskipun pada faktanya masalah tersebut menjadi tanggungjawab seluruh elemen masyarakat, penegak hukum, dan pemerintah.

Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Polairud Polres Sukabumi adalah kurangnya komunikasi antar

instansi, terutama sejak masa pandemi. Dalam kurun waktu 2 tahun sangat jarang terjadi komunikasi, koordinasi dan kolaborasi baru yang dijalankan. Selama ini mereka berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi tertentu yang memang rutin bekerja bersama dalam patroli gabungan. Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan POS AL yang memberikan keterangan bahwa sejak masuk masa pandemi, sangat jarang ada aktivitas gabungan yang dilakukan oleh instansi-instansi termasuk POS AL, Polairud dan BNNK Sukabumi.

4.6. Pembahasan

Penyelundupan narkoba merupakan salah satu ancaman yang dapat mengganggu keamanan nasional. Menurut Farouk Muhammad (2008), bentuk pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami bentuk keamanan suatu negara dapat dilihat dari eskalasi gangguan atau ancaman yang dapat berupa pembajakan, penyelundupan, narkoba, *illegal logging*, *illegal mining* dan *illegal fishing*, *illegal immigrant*, dan lainnya.

Menurut Anggraini (2020), penyeludupan narkoba merupakan kejahatan yang harus menjadi perhatian tidak hanya masyarakat regional tetapi juga masyarakat internasional, karena masalah perdagangan narkoba merupakan kejahatan lintas negara yang mencakup banyak negara.

Karena kejahatan narkoba ini merupakan kejahatan dengan cakupan yang luas, yang didalamnya mengandung unsur penyelundupan, penyalahgunaan, serta keamanan individu, maka dalam lingkup suatu negara perlu banyak pihak yang terlibat dalam upaya penanggulangannya. Koordinasi sangat diperlukan diantara instansi-instansi terkait untuk memaksimalkan terselenggaranya keamanan nasional dari sudut pandang penyelundupan narkoba.

BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi merupakan dua instansi yang memiliki peran penting dalam terciptanya keamanan tersebut, karena keduanya memiliki wewenang dalam hal

penindakan maupun pencegahan kejahatan narkoba. BNNK Sukabumi adalah instansi yang berfokus pada masalah-masalah narkoba dan memiliki tugas pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), sedangkan Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi memiliki kewenangan dalam menanggulangi segala bentuk kejahatan di laut dan pesisir Kabupaten Sukabumi. Oleh karenanya, koordinasi perlu terjalin diantara ketiga instansi tersebut untuk menangkali potensi penyelundupan narkoba melalui laut dan pesisir Kabupaten Sukabumi.

4.6.1. Potensi Ancaman dan Pola Kejahatan Narkoba di Pesisir Kabupaten Sukabumi serta Upaya Penanggulangannya

Ancaman adalah setiap kegiatan yang berasal dari dalam atau luar negeri yang diduga dapat membahayakan wilayah negara dan keamanan bangsa. Ancaman adalah sesuatu yang merintangi kepentingan masyarakat. Ancaman merupakan faktor utama yang memicu terjadinya penangkalan (*deterrence*), baik secara aktual atau nyata maupun potensial atau belum nyata.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu ancaman terhadap keselamatan bangsa. Kejahatan narkoba itu sendiri termasuk dalam kategori industri kriminal yang merupakan bagian dari kegiatan kejahatan transnasional, di samping kejahatan lain yang terkait dengan kejahatan transnasional seperti penyelundupan imigran ilegal, penyelundupan senjata, penyelundupan bahan nuklir, organisasi kriminal internasional dan terorisme, perdagangan bagian tubuh, pencurian dan penyelundupan kendaraan dan pencucian uang (Sudarto, dalam Hasibuan, 2018)

Narkoba menjadi ancaman bagi keselamatan bangsa karena didalamnya terdapat unsur pengrusakan terhadap karakter generasi bangsa secara masif, mengganggu kesehatan penggunanya, baik secara mental maupun fisik, dan dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selain itu, menurut laporan BNN dan PPK UI (2005), kejahatan narkoba sebagai kejahatan lintas negara mengancam eksistensi ketahanan dan keamanan bangsa. Dengan peredarannya yang sangat

masif ini, patut diduga bahwa kejahatan ini memiliki pendanaan yang besar dari sejumlah pihak dengan SDM yang profesional dan teknologi yang maju. Bisnis narkoba membawa bangsa kepada berbagai masalah seperti politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan dan keamanan yang selanjutnya menghambat laju pembangunan bangsa.

Narkoba adalah salah satu bentuk kejahatan transnasional. *International crime* bisa juga disebut kejahatan lintas batas negara dengan mencakup 4 aspek, yaitu a) *Locus Delicti* di lebih dari 1 negara, b). Negara lain menjadi tempat persiapan, perencanaan, dan pengarahannya serta pengawasan; c). Adanya keterlibatan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara dan; d). Berdampak serius pada negara lain (Serrano, 2002). Karakteristik dari kejahatan transnasional itu sendiri memiliki ciri tersendiri, diantaranya: pencucian uang dari perdagangan ilegal, baik yang timbul dari kegiatan kriminal maupun yang diselundupkan ke dalam kegiatan ekonomi yang sah; memperluas jaringan operasinya di luar negeri; berkolaborasi dengan kelompok kejahatan terorganisir transnasional lainnya (Carrapico, 2012). Hal ini yang terjadi pada kejahatan narkoba di kabupaten Sukabumi, dimana menurut Kepala BNNK Sukabumi ada keterlibatan Tindak Pidana Pencucian Uang yang terkait dalam kejahatan narkoba tersebut.

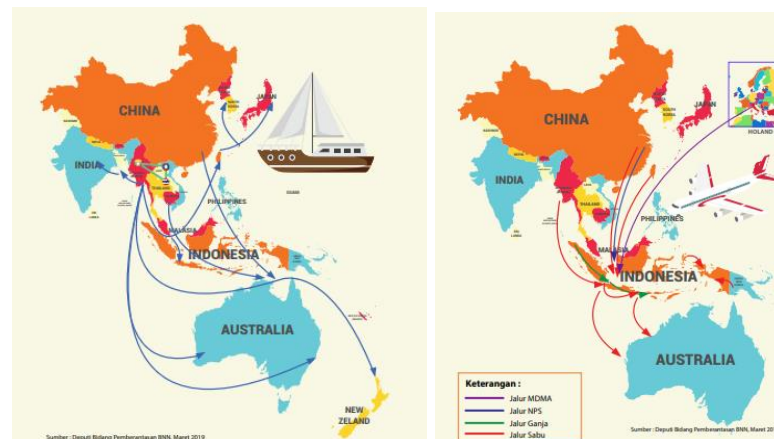
Kegiatan kriminal transnasional di atas, termasuk penyelundupan dan perdagangan narkoba, tidak dapat dipisahkan dari era globalisasi, ditandai dengan munculnya teknologi informasi dan komunikasi yang memungkinkan interaksi individu antar negara lebih intens. Komunikasi dan pertukaran informasi dapat dilakukan dengan cepat. Munculnya teknologi informasi dan komunikasi, di satu sisi, “menyederhanakan dan memuaskan” pekerjaan baik bagi individu maupun organisasi. Namun di sisi lain, seperti dikemukakan Thomas L. Friedman, teknologi mendorong dan bahkan memajukan globalisasi, yang mencakup integrasi global, dan juga merupakan alat bagi para penjahat untuk meningkatkan intensitas operasi mereka baik di tingkat lokal maupun global. Dunia tampak seperti desa global (*global village*) (Friedman, 2000).

Dampak era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi, liberalisasi perdagangan, dan kemajuan industri pariwisata, telah mendorong Indonesia untuk tumbuh dan menjadi negara penghasil narkoba. Penyelundupan obat-obatan terlarang ini tidak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri melalui jalur darat, laut dan udara. Hal ini mungkin disebabkan lemahnya sistem pengawasan dan keamanan di wilayah perbatasan. Sarana dan prasarana yang belum memadai, serta kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebijakan di daerah perbatasan yang memicu kesenjangan antara masyarakat lokal di sekitar perbatasan dengan masyarakat di kota. Hal inilah yang mendorong masyarakat di sekitar perbatasan untuk mencari cara lain untuk mencari nafkah, meski harus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan kata lain, ada kegiatan penyelundupan narkoba yang dibawa ke negara ini secara ilegal dari negara tetangga melalui orang-orang di perbatasan.

Sebagai negara kepulauan, tentunya Indonesia memiliki banyak lautan yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk ke negara ini. Persoalannya, tidak semua kawasan maritim di Indonesia mendapat perhatian dan pengawasan yang optimal dari pemerintah. Luasnya lautan Indonesia tidak tercover oleh personel yang memadai, akibatnya sebagian wilayah perbatasan laut Indonesia tidak dapat dilindungi. Kesenjangan inilah yang dibidik banyak pengedar narkoba asing untuk bisa membawa barangnya ke Indonesia lewat jalur laut. Tak hanya itu, sedikitnya jumlah staf dan gaji yang dianggap tidak proporsional membuat para penjaga perbatasan melepaskan pengedar narkoba, seringkali dengan imbalan suap (Puspitosari, 2013).

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional, dimana tidak hanya satu negara yang terlibat. Dalam suatu sindikat pengedar narkoba, pergerakan yang dilakukan meliputi banyak negara. Mengenai masuknya narkoba ke Indonesia, Deputy Bidang Pemberantasan BNN (2019) menyatakan bahwa Indonesia masuk kedalam jalur penyelundupan sabu-sabu dari segitiga emas. Perpindahan sabu-sabu tersebut berasal dari segitiga emas yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos, serta dari China dan

Kamboja yang menuju ke Australia, Malaysia, dan New Zealand yang melalui perairan internasional dan perairan Indonesia. Sedangkan peredaran narkoba melalui jalur udara masuk ke Indonesia dari China, Myanmar, dan Belanda dan Papua Nugini. Hal ini ditunjukkan oleh gambar 4.2.



Gambar 4.2. Jalur Peredaran Narkoba melalui Laut (Kiri) dan Udara (Kanan) yang melalui Indonesia

Sumber: BNN (2019)

Purnomo Yusgiantoro (dalam Permana, 2019) menyatakan bahwa cara menghadapi ancaman yaitu dengan adanya penangkalan. Penangkalan adalah perwujudan usaha pertahanan dan keamanan negara dari seluruh kekuatan nasional untuk mencegah setiap ancaman, dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki kewajiban untuk terlibat dalam upaya ini.

Ricardo (2012) menyatakan bahwa upaya penanggulangan narkoba, baik penyalahgunaan, perdagangan maupun penyelundupan, dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif adalah upaya pencegahan dini, meliputi pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang ditujukan untuk mempengaruhi faktor pendorong dan faktor peluang adanya kejahatan (Faktor Korelatif Kriminogen). Dengan demikian akan tercipta kondisi kewaspadaan dan pencegahan serta akan berkembang dan terciptanya kondisi perilaku dan norma kehidupan yang bebas dari segala ancaman narkoba. (Dit Bimmas Polri, 2000). **Upaya Preventif** adalah upaya pencegahan terjadinya gangguan. Dalam hal ini, upaya yang

dilakukan adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan narkoba, baik dengan penyuluhan, patroli, maupun program-program edukasi ke masyarakat. Sedangkan **Upaya Represif** adalah upaya penindakan ketika pihak berwenang mendapatkan informasi mengenai tindak kejahatan narkoba, baik penyalahgunaan maupun penyelundupan. Hal ini meliputi penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi, yang terdiri dari pengamatan, wawancara, *surveillance* (pembuntutan), dan *undercover* (penyamaran). Selanjutnya dilakukan penyidikan yang mencakup penangkapan diduga tersangka (Ricardo, 2012).

Penyelundupan narkoba di Kabupaten Sukabumi menjadi salah satu bukti nyata hal tersebut. Meskipun pada tahun 2020 Kapolres menyatakan bahwa daerah pesisir Kabupaten Sukabumi, khususnya Palabuhan Ratu, menjadi “Jalur Baru” penyelundupan narkoba, nyatanya informan di instansi yang berkaitan langsung dengan penyelundupan narkoba berkata sebaliknya. Telah banyak penyelundupan yang dilakukan melalui jalur-jalur tikus di sepanjang garis pantai Kabupaten Sukabumi. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya penangkapan beberapa penyeludup di daerah Kabupaten Sukabumi dan penyitaan barang bukti hingga ratusan kilogram.

Di Kabupaten Sukabumi sendiri, kerawanan kasus kejahatan narkoba ditunjukkan oleh peta dalam gambar 4.3. berikut ini:



Gambar 4.3. Sebaran Kerawanan Kasus Narkoba di Kabupaten Sukabumi

Sumber: BNN Provinsi Jawa Barat (2019)

Dalam gambar 4.3., ditunjukkan bahwa kasus-kasus narkoba ditunjukkan dengan indikator titik berwarna. Suatu daerah berada pada tingkat waspada kejahatan narkoba bila ditandai oleh titik warna biru, dengan jumlah 0 – 4 kasus. Tanda titik kuning dengan jumlah 5 - 9 kasus menunjukkan daerah tersebut dalam tingkat rentan kejahatan narkoba. Selanjutnya tanda titik merah membuktikan bahwa daerah tersebut rawan kejahatan narkoba, dengan jumlah lebih dari 10 kasus.

Berdasarkan keterangan dari informan BNNK, terdapat 15 kasus yang telah ditangani oleh pihak BNNK Sukabumi. Dengan melihat indikator yang dikeluarkan oleh BNN pada gambar 4.3, maka kondisi kejahatan penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi termasuk rawan. Hal ini didukung oleh keterangan yang ditunjukkan oleh gambar 4.3, dimana diantara kecamatan yang memiliki tanda titik merah, terdapat kecamatan yang berada di pesisir pantai kabupaten sukabumi. Dapat dilihat bahwa diantara kecamatan yang memiliki tanda titik merah, terdapat kecamatan yang berada di pesisir pantai kabupaten sukabumi. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kemungkinan daerah tersebut menjadi pintu masuk penyelundupan narkoba di kabupaten Sukabumi.

Banyaknya kasus penyelundupan ini salah satunya berkaitan dengan kondisi alam yang menyulitkan pengawasan atau patroli. Garis pantai Kabupaten Sukabumi yang panjang, mencapai 120 Kilometer hanya dicover oleh 7 kapal dari Polairud Polres Sukabumi, 1 kapal milik Posal, dan beberapa kapal dari instansi lain, dengan ukuran panjang kapal rata-rata 12 meter. Selain itu, kondisi perairan di Kabupaten Sukabumi yang berombak besar, membuat kapal-kapal tersebut tidak dapat menjaga terus menerus di perairan. Kondisi saat ini, kapal-kapal tersebut bersandar di dermaga dan hanya digunakan ketika patroli mandiri dengan frekuensi 2 kali dalam seminggu, dan terkadang dalam patroli gabungan dengan instansi-instansi lain yang pelaksanaannya seminggu berturut-turut, namun bersifat insidental (Serma Wahyudin, dalam wawancara tahun 2022)

Meskipun begitu, dalam upaya penanggulangan narkoba, baik BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi telah

melakukan upaya yang sistematis, baik penindakan maupun pencegahan, sesuai misi Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Dalam upaya penindakan, ketiga instansi tersebut memiliki SOP yang sistematis meliputi penggalian informasi dari informan, baik dari pemerintah maupun masyarakat, serta penyelenggaraan sidik dan lidik. Hal ini mengacu pada undang-undang dan KUHAP yang berlaku.

Sedangkan dalam upaya pencegahannya, yang dilakukan BNNK Sukabumi berupa 3 kebijakan berupa *Demand Reduction* yang meliputi *Soft Power approach* dan Rehabilitasi, *Hard Power approach*, dan *Smart IT approach*, dimana salah satu perwujudannya adalah program Desa Bersinar (Bersih dari Narkoba). Sedangkan Polairud Polres Sukabumi melakukan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba agar para nelayan di daerah pesisir tidak membantu para penyeludup narkoba, baik disengaja maupun tidak disengaja. Hal ini serupa dengan yang dilakukan POS AL Sukabumi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba, sebenarnya instansi-instansi di Kabupaten Sukabumi telah membentuk sebuah Tim Terpadu, dimana anggota tim ini adalah kepala dari 43 kepala instansi di Kabupaten Sukabumi, baik instansi penegak hukum maupun instansi pemerintahan. Dengan kerjasama antara 43 instansi ini, maka seharusnya penanggulangan kejahatan narkoba dapat dilakukan lebih mudah. Hal ini didukung oleh keterangan dari kepala satuan Polairud Polres Sukabumi bahwa mengenai kewenangan, setiap instansi yang berwenang didalam bidang kejahatan narkoba dapat langsung menindak apabila terjadi suatu kejahatan narkoba, tanpa menunggu pihak instansi lain atau menunggu untuk bergerak bersama. Dengan keadaan ini, maka kejahatan narkoba di Kabupaten Sukabumi dapat diberantas dengan lebih cepat dan efektif.

Pembentukan Tim Terpadu tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Sitompul (2021) bahwa harus ada koalisi antara masyarakat, pemerintah, dan elemen-elemen terkait dalam menangani masalah narkoba, seperti yang telah dilakukan oleh *Community Anti-Drug*

Coalitions of America (CADCA), yang mana metode dari CADCA adalah pemberdayaan masyarakat.

Dari analisa diatas, dapat diketahui bahwa secara garis besar, daerah pesisir Kabupaten Sukabumi masih menjadi daerah yang rawan bagi penyelundupan narkoba. Masih belum ada sistem yang optimal yang dapat menangkal penyelundupan narkoba melalui pesisir Kabupaten Sukabumi, hal ini karena faktor alam dan faktor instansi yang memiliki SDM dan Sarana yang kurang. Meskipun begitu, telah banyak upaya yang dilakukan baik oleh BNNK Sukabumi maupun Polairud Polres Sukabumi dalam menanggulangi penyelundupan narkoba di pesisir Kabupaten Sukabumi.

4.6.2. *Interagency Coordination* antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi.

Dalam upaya penanggulangan kejahatan narkoba, diperlukan campur tangan setiap pihak berwenang maupun masyarakat. Dengan adanya kerjasama, setiap instansi mampu melengkapi kekurangan instansi lainnya. Selain itu, ruang lingkup kerja semakin luas dan semakin cepat dalam hal penanganannya.

Menurut Anggraini (2019), Adanya kesamaan perspektif antar instansi akan memberikan kompleksitas pemikiran yang menyeluruh dalam penanggulangan permasalahan penyelundupan narkoba. Kesamaan prespektif ini akan membuat semua lembaga saling membantu dalam tercapainya tujuan yang besar. Hal ini tentu saja harus diiringi dengan penekanan terhadap ego sektoral di masing-masing instansi. Ego sektoral merupakan penghambat yang paling nyata dalam melakukan kegiatan bersama diberbagai elemen di pemerintahan atau lembaga.

Sesuai dengan pengertiannya, yang dirangkum dari beberapa sumber, *Interagency Coordination* dapat berarti aktivitas gabungan (Bardach, 1998), sinkronisasi yang teratur (Terry dalam Syaffie, 2006), wujud kerjasama (Aisyah, 2013), dan keselarasan (Sutarto, 2006). Semua itu mengacu pada hubungan dua atau lebih instansi atau lembaga dalam menyelesaikan satu masalah bersama-sama. Selaras dengan konsep

WOG, dimana seluruh elemen pemerintahan bergerak bersama-sama dengan paradigma yang tertanam bahwa satu masalah menjadi tanggungjawab bersama, bukan hanya tanggungjawab instansi yang fokus kepada masalah tersebut.

Koordinasi berhubungan dengan puncaknya yaitu sinergi. Ketika sinergi terbentuk, maka dapat dikatakan bahwa komunikasi, koordinasi, kolaborasi dan kooperasi antar instansi tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menghasilkan ide atau gagasan tertentu dan penyelesaian masalah untuk mencapai visi bersama. Kolaborasi merupakan kunci pemikiran kreatif. Sedangkan kooperasi juga dapat diterjemahkan dengan sebuah kerja sama antara dua pihak. Komunikasi dan kolaborasi adalah langkah awal untuk membentuk elemen sinergi selanjutnya. Sebagai contoh, ketika dikatakan sebuah tim bersinergi, maka komunikasi antar anggota tim tersebut sudah tidak ada kendala, koordinasi, kolaborasi dan kooperasinya berjalan lancar dengan kesadaran masing-masing sehingga tidak perlu upaya yang lebih untuk mengatur hal tersebut. Namun sebaliknya, bila suatu tim baru saja menjajaki atau berusaha untuk menjalin sebuah komunikasi atau koordinasi, maka tim tersebut tidak dapat dikatakan bersinergi.

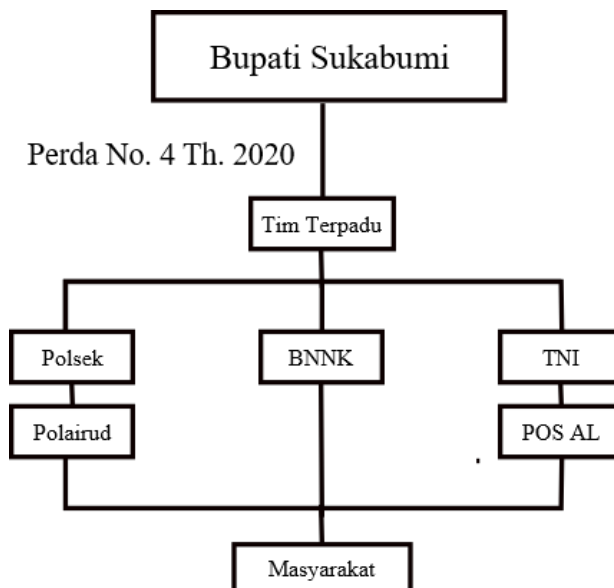
Setiap instansi membutuhkan bentuk koordinasi dengan instansi lain. Koordinasi berperan sangat penting, diantaranya mencegah terjadinya kekacauan, instansi dapat diselaraskan dengan tugasnya, dapat memanfaatkan sarana prasarana, agar semua unsur yang terlibat harus membantu tujuan bersama, dan semuanya mengenai sasaran yang diinginkan (Pusdikmin Lemdiklat, 2014). Menurut Mintzberg (1983), mekanisme koordinasi terbagi menjadi 3 macam, yaitu ***mutual adjustment*** (penyesuaian timbal balik) dimana koordinasinya mengutamakan komunikasi informal antar kedua belah pihak. Kesepahaman perlu terbangun untuk mencapai keoptimalan hasil kerja dalam mekanisme ini; ***direct supervision*** (supervisi langsung), dimana ada seseorang yang mengawasi dan bertanggungjawab atas hasil kerja pihak-pihak yang terlibat; dan ***standardization*** (standarisasi), yaitu mekanisme koordinasi yang mengharuskan penyusunan protap, aturan, atau tata cara kerja yang

bertujuan untuk meningkatkan dan menyetarakan kemampuan pihak-pihak terkait dan juga untuk menyelaraskan tujuan yang akan dicapai bersama.

Berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang dijalankan, Handoko (2003) menyatakan bahwa berdasarkan teori James D. Thompson, tipe ketergantungan tugas terdiri dari 3 jenis, yaitu ***reciprocal interdependence*** (ketergantungan timbal balik), dimana setiap unit yang terlibat memberi hasil kerja (*output*) dan menerima masukan (*input*) antar unit yang terlibat dalam waktu yang bersamaan; ***sequential interdependence*** (ketergantungan berurutan) yang mengharuskan satu unit harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu sebelum unit lain bekerja; ***pooled interdependence*** (ketergantungan terpusat / berkelompok), yaitu tipe ketergantungan tugas yang tidak saling menyatu dan dapat bergerak masing-masing serta tidak memerlukan interaksi antarunit secara intensi karena tugas masing-masing dapat dilakukan secara terpisah.

Berdasarkan teori mekanisme koordinasi dan tipe ketergantungan antar unit diatas, dapat dikatakan bahwa dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba di Kabupaten Sukabumi, perlu bentuk mekanisme koordinasi ***Standardization*** dimana seluruh pihak yang terlibat membuat rincian tugas masing-masing, menandatangani MoU, dan lain sebagainya. Namun dalam beberapa hal, mekanisme ***direct supervised*** juga diperlukan dengan keterlibatan pemerintah daerah yang mengawasi seluruh kegiatan koordinasi instansi-instansi tersebut, seperti yang telah dilakukan dalam pembentukan Tim Terpadu penanggulangan narkoba Kabupaten Sukabumi, yang memiliki payung hukum yaitu Perda nomor 4 tahun 2020, ditandatangani dan diketuai oleh Bupati Sukabumi secara langsung. Ketergantungan antara pihak-pihak tersebut adalah ***pooled interdependence*** dimana setiap instansi memiliki tugas pokok masing-masing, dan menjalani hal tersebut secara terpisah. Meskipun suatu waktu dapat pula bekerja bersama dalam kerangka ***reciprocal interdependence*** dimana setiap instansi memberikan dan menerima masukan-masukan dalam upaya penanganan penyelundupan narkoba di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Oleh karenanya, model koordinasi dalam penanganan penyelundupan narkoba dapat digambarkan sebagai berikut:

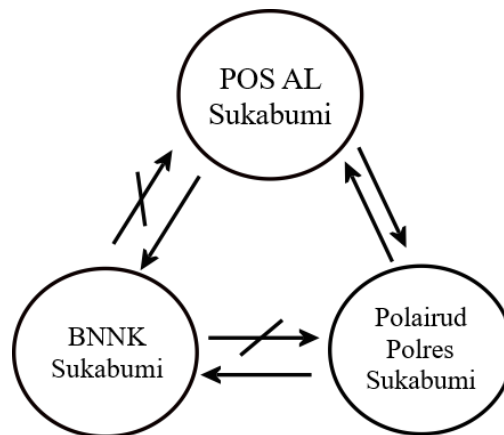


Gambar 4.4. Model Koordinasi Antarlembaga dalam Penanganan Penyelundupan Narkoba di Kabupaten Sukabumi

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

Dengan cakupan tugas BNNK Sukabumi yang berfokus pada penanggulangan kejahatan narkoba, dan Polairud Polres Sukabumi beserta POS AL Sukabumi yang berperan menjaga keamanan di wilayah pesisir dan laut Kabupaten Sukabumi, maka bentuk koordinasi yang seharusnya terjalin diantara ketiganya adalah koordinasi fungsional, dimana fungsi keduanya saling mendukung dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba.

Dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba oleh BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi masing-masing instansi telah menjalankan koordinasi yang baik dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Namun diantara BNNK Sukabumi dengan Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi tidak terbentuk *interagency coordination* yang baik. Skema koordinasi antarlembaga keduanya ditunjukkan oleh gambar 4.5.



Gambar 4.5. Gambaran *Interagency Coordination* BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi saat ini

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

Terdapat 4 indikator untuk mengukur apakah diantara dua atau lebih instansi telah berkoordinasi. Hal ini dinyatakan oleh Handayani (1991), dimana indikator tersebut adalah komunikasi, kesadaran antara dua belah pihak atau lembaga, kesepakatan dan komitmen, serta kontinuitas perencanaan.

Dari segi komunikasi, BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi masing-masing telah menjalin komunikasi yang baik dengan banyak pihak. BNNK Sukabumi menjalin komunikasi yang baik, contohnya dengan kejaksaan dan lembaga masyarakat sehingga proses penindakan pelaku penyelundupan narkoba dapat dilakukan dalam waktu singkat. Selain itu komunikasi juga dilakukan kepada setiap kepala desa untuk mewujudkan program Desa Bersinar. Begitu juga dengan Polairud Polres Sukabumi yang salah satu upayanya dalam mencegah penyelundupan narkoba adalah dengan membentuk Jaringan Informasi Masyarakat sebagai sumber informasi utama terhadap tindak pidana penyelundupan narkoba. Namun komunikasi diantara keduanya belum terjalin dengan baik, atau dapat dikatakan sedang ada dalam kondisi *vacuum*, karena sejak pergantian kepala baru, belum ada komunikasi lebih lanjut diantara keduanya. Sedangkan POS AL telah banyak melakukan pertukaran informasi dengan banyak instansi, termasuk BNNK sukabumi dan Polairud Polres Sukabumi, dalam membahas kerawanan-kerawanan dalam kejahatan narkoba di Kabupaten Sukabumi.

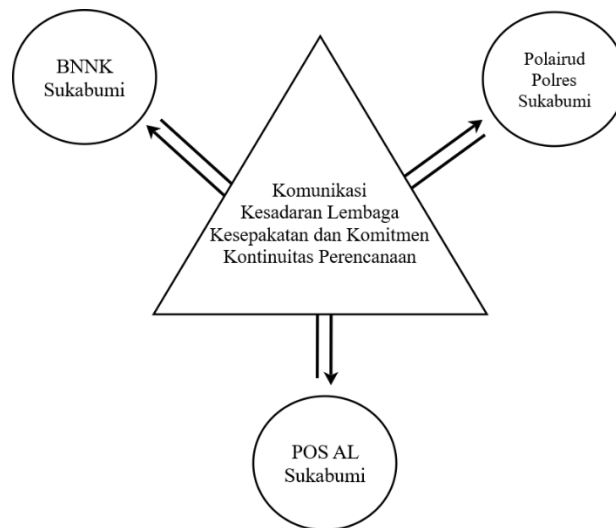
Dari segi kesadaran membentuk koordinasi, informan dari ketiga instansi yaitu BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi menyatakan bahwa mereka tidak dapat bekerja sendiri, perlu ada hubungan yang saling menopang dengan instansi lain ataupun diantara ketiganya. Untuk menanggulangi kejahatan penyelundupan narkoba, baik BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi maupun POS AL Sukabumi sepakat bahwa mereka saling membutuhkan keterlibatan satu sama lain, meskipun saat ini belum terbentuk koordinasi. Hal ini yang menimbulkan perencanaan untuk memulai koordinasi di masa depan.

BNNK telah banyak membentuk kesepakatan dan komitmen, diantaranya dengan pemerintah daerah dalam realisasi program Desa Bersinar, membentuk MoU dengan organisasi masyarakat, membentuk Tim Terpadu yang terdiri dari 43 kepala Instansi, dan lain-lain. Polairud Polres Sukabumi berkomitmen dengan beberapa instansi untuk melakukan patroli gabungan dan dengan pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan edukasi dan penyuluhan. Begitupun POS AL berkomitmen dengan MUSPIDA setempat dalam memberikan komunikasi sosial ke masyarakat. Namun diantara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi belum terbentuk kesepakatan maupun komitmen tertentu dalam hal penanganan penyelundupan narkoba di Kabupaten Sukabumi.

Dari segi kontinuitas perencanaan, ketiganya telah memrencanakan program-program tertentu kedepannya. Informan BNNK Sukabumi menyatakan bahwa ada banyak perencanaan yang akan dilaksanakan di masa depan, diantaranya memperbanyak kerjasama, sebagai contoh di awal 2022 akan ada MoU dengan Forum Kebangsaan, FKDM, PMI, Karang taruna, KNPI, dan lain-lain. Pihaknya juga akan melantik satgas anti narkoba tingkat desa dan kecamatan, dan realisasi program-program bebas narkoba. Sedangkan Polairud Polres Sukabumi memiliki perencanaan untuk membangun koordinasi dengan lebih baik dengan berbagai pihak dan juga dengan BNNK Sukabumi. POS AL memiliki perencanaan dalam hal pengembangan penjagaan di laut, namun peneliti memandang bahwa pihak POS AL lebih mengikuti alur dari atasan, yang dalam hal ini LANAL

Bandung, sehingga tidak ada perencanaan yang signifikan yang dilakukan oleh POS AL Sukabumi.

Konsep *interagency coordination* dapat dikatakan teraplikasikan dengan baik apabila dalam hubungan instansi-instansi tersebut seluruh indikator koordinasi terpenuhi, yaitu adanya komunikasi yang intens, kesadaran bahwa koordinasi dibutuhkan dalam penyelesaian suatu masalah, adanya suatu bentuk komitmen atau kesepakatan dalam bentuk MoU maupun yang sejenisnya, dan adanya perencanaan untuk proses koordinasi di masa yang akan datang. Hal ini dapat dilihat dalam Gambar 4.6 berikut.



Gambar 4.6. Pola Koordinasi yang seharusnya antara BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi, dan POS AL Sukabumi

Sumber: hasil olahan peneliti (2022)

Dari hasil analisa diatas, dapat dilihat bahwa berdasarkan indikator koordinasi, BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi belum menerapkan konsep *interagency coordination* dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dari absennya komunikasi dan kesepakatan atau komitmen diantara ketiganya. Meskipun begitu, kesadaran bahwa BNNK Sukabumi, Polairud Polres Sukabumi dan POS AL Sukabumi saling membutuhkan dalam menangani masalah penyelundupan narkoba membuat mereka merasa perlu untuk memulai koordinasi di masa yang akan datang dengan menjalin komunikasi sebagai langkah awal terciptanya *interagency coordination* diantara keduanya.

Hal ini dapat diterjemahkan sebagai kurangnya informasi sebagai langkah awal koordinasi yang terjalin antara keduanya. Peneliti memandang ini sebagai kekurangan sebuah instansi ketika berganti kepala baru, sehingga progress sebelumnya tidak *terfollow up* dengan baik. Hal ini diperkuat dengan pernyataan wakil komandan POS AL bahwa sejak masa pandemi, belum ada pertemuan-pertemuan terkait kerawanan-kerawanan yang dilakukan oleh BNNK Sukabumi kepada instansi-instansi yang berhubungan dengan keamanan laut, yang sebelumnya secara rutin dilakukan. Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Kasat Polairud yang menyatakan bahwa dalam masa kepemimpinannya, beliau hanya meneruskan apa yang telah terbentuk dari Kasat sebelumnya.

BNNK Sukabumi menyatakan bahwa hal terpenting dari menerapkan *interagency coordination* diantara keduanya adalah komunikasi, dimana pihaknya akan bergerak membangun komunikasi dengan Polairud Polres Sukabumi. Sofyan dan Garniwa (2007) menyatakan bahwa komunikasi adalah kegiatan dimana seseorang atau instansi secara sungguh-sungguh membentuk serah-terima stimulus atau rangsangan, sehingga terbentuk *interagency coordination* dalam upaya penanggulangan penyelundupan narkoba yang selangkah lebih maju dari apa yang telah terbentuk selama ini .